

# **SKRIPSI**

## **ANALISIS FUNGSI KEPEMIMPINAN KEPALA DESA DALAM PEMBANGUNAN DI DESA MAHATO SAKTI KEC. TAMBUSAI UTARA KAB. ROKAN HULU**

**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat  
Dalam Meraih Gelar Sarjana Sosial (S.1) Pada  
Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial  
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau**



**OLEH:  
SETIAWAN  
Nim. 10875004630**

**JURUSAN ADMINISTRASI NEGARA  
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM  
RIAU 2011**

## DAFTAR ISI

<b>Kata Pengantar .....</b>	<b>i</b>
<b>Daftar Isi .....</b>	<b>iv</b>
<b>Daftar Tabel .....</b>	<b>vi</b>
<b>Abstrak .....</b>	<b>xi</b>

### **BAB I PENDAHULUAN**

1.1 Latar Belakang Masalah. ....	1
1.2. Perumusan Masalah. ....	12
1.3. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian. ....	12

### **BAB II TELAAH PUSTAKA DAN KERANGKA PIKIR**

2.1. Konsep Kepemimpinan. ....	14
2.2. Ciri-ciri Kepemimpinan yang Baik .....	16
2.3. Fungsi kepemimpinan .....	23
2.4. Pemerintahan Desa .....	27
2.5. Tugas dan Fungsi Kepala Desa .....	28
2.6. Kerangka Pemikiran .....	34
2.6 Hipotesis .....	35
2.7 Definisi Konsep .....	35
2.8 Indikator variabel.....	36
2.9 Teknik Pengukuran .....	37

### **BAB III METODE PENELITIAN**

3.1 Lokasi dan Jenis Penelitian .....	40
3.2 Populasi dan sampel .....	41
3.3 Jenis dan Sumber Data .....	42

3.4	Teknik Pengumpulan Data .....	43
3.5	Analisis Data .....	44

#### **BAB IV GAMBARAN UMUM DESA MAHATO SAKTI**

4.1	Luas Batas Wilayah. ....	45
4.2	Keadaan Penduduk .....	45
4.3	Perekonomian .....	47
4.4	Struktur Organisasi Desa dan Uraian Tugas .....	41
4.5	Sosial .....	52
4.6	Pendidikan. ....	53
4.7	Kesehatan .....	55
4.8	Agama .....	56

#### **BAB V PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN**

5.1.	Identitas Responden Penelitian. ....	58
5.2.	Distribusi Jawaban Responden Terhadap Pertanyaan Pelaksanaan Kepemimpinan Kepala Desa Di Desa Mahato Sakti Kecamatan Tambusai Utara. ....	60
5.3.	Analisa Indikator Variabel Penelitian. ....	87

#### **BAB VI PENUTUP**

6.1	Kesimpulan .....	106
6.2	Saran .....	106

#### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

## DAFTAR TABEL

	Halaman
<b>Tabel I.1.</b> Jadwal Kegiatan Musyawarah Pembangunan Desa Mahato Sakti Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu.....	6
<b>Tabel. I.2.</b> Sumbangan Partisipasi Masyarakat untuk Pembangunan dari Bulan Maret Hingga Bulan Mei 2010. ....	7
<b>Tabel 1.3.</b> Bantuan Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu Sejak Bulan April Hingga Bulan Juni 2010. ....	8
<b>Tabel I.4.</b> Program Tahunan Kegiatan Perencanaan Pembangunan di Desa Mahato Sakti Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu Pada Tahun Anggaran 2010 .....	10
<b>Tabel III.1.</b> Populasi dan Sampel Penelitian Tentang Pelaksanaan Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Pembangunan di Desa Mahato Sakti Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu. ....	35
<b>Tabel III.2.</b> Populasi dan Sampel Penelitian Masyarakat Desa Mahato Sakti .....	36
<b>Tabel IV.1.</b> Keadaan Penduduk Desa Mahato Sakti Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu .....	40
<b>Tabel IV.2</b> Mata Pencarian Penduduk Desa Mahato Sakti Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu .....	41
<b>Tabel IV.3.</b> Sarana Pendidikan Di Desa Mahato Sakti Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu .....	47
<b>Tabel IV.4.</b> Jumlah Penduduk Desa Mahato Sakti Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu Menurut Tingkat Pendidikan. ....	48
<b>Tabel IV.5.</b> Jumlah Tenaga Medis dan Pegawai di Puskesmas Desa Mahato Sakti Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu. ....	50

<b>Tabel IV.6.</b>	Sarana Ibadah di Desa Mahato Sakti Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu. ....	51
<b>Tabel V.1.</b>	Identitas responden menurut tingkat pendidikan .....	52
<b>Tabel.V.2.</b>	Identitas responden menurut jenis kelamin .....	53
<b>Tabel V.3.</b>	Identitas responden menurut tingkat umur .....	54
<b>Tabel V.4.</b>	Distribusi jawaban responden tentang pelaksanaan kepemimpinan kepala desa sebagai aparat pemerintah .....	56
<b>Tabel V.5.</b>	Distribusi jawaban responden tentang tingkat pelaksanaan kepemimpinan demokrasi .....	56
<b>Tabel V.6.</b>	Distribusi jawaban responden tentang pemberian tugas kepala desa kepada bawahan. ....	57
<b>Tabel V.7.</b>	Distribusi jawaban responden tentang kepemimpinan kepala desa dalam pengambilan keputusan. ....	58
<b>Tabel V.8.</b>	Distribusi jawaban responden tentang kepemimpinan kepala desa dalam menerima aspirasi masyarakat. ....	59
<b>Tabel V.9.</b>	Distribusi jawaban responden tentang kepemimpinan kepala desa dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. ....	59
<b>Tabel V.10.</b>	Distribusi jawaban responden tentang kepemimpinan kepala desa terhadap pelaksanaan kebijakan. ....	60
<b>Tabel V.11.</b>	Distribusi jawaban responden tentang ketauladanan kepala Desa terhadap masyarakat. ....	61
<b>Tabel V.12.</b>	Distribusi jawaban responden tentang upaya kepala desa dalam melaksanakan pembangunan.....	62
<b>Tabel V.13.</b>	Distribusi jawaban responden tentang kepemimpinan kepala desa terhadap pembangunan pendidikan dan mental. ....	62

<b>Tabel V.14.</b>	Distribusi jawaban responden tentang kepemimpinan kepala desa dalam merealisasikan program kerja. ....	63
<b>Tabel V.15.</b>	Distribusi jawaban responden tentang kepemimpinan kepala desa terhadap ketaatan hukum yang berlaku ....	63
<b>Tabel V.16.</b>	Distribusi jawaban responden tentang kemampuan kepala desa dalam memberikan yang terbaik terhadap pembangunan. ....	64
<b>Tabel V.17.</b>	Distribusi jawaban responden tentang keberhasilan kepala desa dalam melaksanakan pembangunan. ....	64
<b>Tabel V.18.</b>	Distribusi jawaban responden tentang keberhasilan kepala desa dalam pembangunan infrastruktur. ....	65
<b>Tabel V.19.</b>	Distribusi jawaban responden tentang keberhasilan kepala desa dalam merancang program pembangunan. ....	66
<b>Tabel V.20.</b>	Distribusi jawaban responden tentang keberhasilan kepala desa dalam melaksanakan pelayanan publik. ....	67
<b>Tabel V.21.</b>	Distribusi jawaban responden tentang keberhasilan kepala desa dalam memelihara kenyamanan dan keharmonisan masyarakat. ....	67
<b>Tabel V.22.</b>	Distribusi jawaban responden tentang keberhasilan kepala desa dalam memelihara budaya masyarakat. ....	68
<b>Tabel V.23.</b>	Distribusi jawaban responden tentang keberhasilan kepala Desa dalam melaksanakan kebijakan ....	68
<b>Tabel V.24.</b>	Distribusi jawaban responden tentang keberhasilan kepala desa dalam menggali potensi masyarakat. ....	69
<b>Tabel V.25.</b>	Distribusi jawaban responden tentang keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan desa. ....	70
<b>Tabel V.26.</b>	Distribusi jawaban responden tentang kepedulian masyarakat terhadap pembangunan pendidikan dan mental. ....	70

<b>Tabel V.27.</b>	Distribusi jawaban responden tentang partisipasi masyarakat dalam kegiatan sosial. ....	71
<b>Tabel V.28.</b>	Distribusi jawaban responden tentang partisipasi masyarakat dalam bentuk ide dan pemikiran. ....	72
<b>Tabel V.29.</b>	Distribusi jawaban responden tentang partisipasi masyarakat terhadap pembangunan dalam bentuk materi. ....	73
<b>Tabel V.30.</b>	Distribusi jawaban responden tentang partisipasi masyarakat dalam pembangunan spiritual ....	73
<b>Tabel V.31.</b>	Distribusi jawaban responden tentang partisipasi masyarakat dalam gotong- royong dalam pembangunan desa. ....	74
<b>Tabel V.32.</b>	Distribusi jawaban responden tentang peranan masyarakat dalam pembangunan desa. ....	74
<b>Tabel V.33.</b>	Distribusi jawaban responden tentang partisipasi masyarakat dalam menjaga budaya masyarakat. ....	75
<b>Tabel V.34.</b>	Indikator mengurus kegiatan rumah tangganya ....	76
<b>Tabel V.35.</b>	Tabel Pendukung mengurus kegiatan rumah tangganya ....	78
<b>Tabel V.36.</b>	Indikator melaksanakan tugas dari pemerintahan di atasnya. ....	81
<b>Tabel V.37.</b>	Tabel pendukung melaksanakan tugas dari pemerintahan di atasnya.....	83
<b>Tabel V.38.</b>	Indikator menggerakkan partisipasi masyarakat. ....	85
<b>Tabel V.39.</b>	Tabel pendukung menggerakkan partisipasi masyarakat. ....	87
<b>Tabel V.40.</b>	Indikator menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.....	89
<b>Tabel V.41.</b>	Indikator melaksanakan tugas dari pemerintahan di atasnya. ....	91

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Otonomi daerah sebagai wujud dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah, pada hakikatnya menganut asas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Adapun tujuan pemberian otonomi daerah ini adalah untuk memungkinkan daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat dan pelaksanaan pembangunan.

Pelaksanaan pembangunan nasional yang dilakukan bangsa Indonesia adalah ditujukan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat dan mengingat masyarakat Indonesia yang sebagian besar berada di pedesaan maka kelangsungan kegiatan pembangunan diorientasikan kepada pembangunan di pedesaan, sehingga dapat dikatakan keberhasilan pembangunan nasional akan tercermin dari keberhasilan pembangunan di pedesaan.

Desa merupakan simpul bagi perencanaan partisipatif, yakni menjadi dasar perencanaan pembangunan yang berasal dari bawah. Pemerintah desa berfungsi merencanakan dan melaksanakan pembangunan. Sebab itu peranan desa lebih tepatnya sebagai penggerak pembangunan dan dalam hal ini pemerintah desa harusnya selalu merencanakan hal – hal yang akan dilaksanakan pada jangka panjang maupun jangka pendek. Agar pembangunan di pedesaan dapat terlaksana dan berjalan lancar, diperlukan adanya suatu pemerintahan yang mampu melaksanakan program pembangunan pada tingkat terendah yakni desa /



kelurahan sesuai dengan undang-undang No 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. Menurut Undang-undang No 32 Tahun 2004 tersebut pemerintahan desa merupakan pemerintahan tingkat terendah yang langsung bertanggung jawab kepada camat, yang mempunyai tugas melaksanakan pemerintahan, pembangunan, maupun tugas-tugas kemasyarakatan.

Salah satu konsekuensi yang logis dari kenyataan yang ada bahwa ciri-ciri dari kepemimpinan digunakan atau ditonjolkan dengan bobot intensitas yang berbeda artinya berbagai ciri yang dimiliki oleh seorang pemimpin tidak seluruhnya digunakan secara serentak. Berdasarkan analisis kepemimpinan Siagian (2003:75) dapat diketahui ciri-ciri kepemimpinan yang baik adalah:

1. Pengetahuan umum yang luas
2. Keterampilan berkomunikasi secara efektif
3. Keterampilan mendidik
4. Rasionalitas
5. Kemampuan membedakan yang umum dan yang khusus
6. Keteladanan

Pelaksanaan pemerintahan Desa pada masa orde baru (Zaman Soeharto) tinggal sedikit dan diharapkan masa yang akan datang lebih baik lagi dengan mengembalikan fungsi pemerintahan desa itu sendiri. Sekarang dengan lahirnya Peraturan Daerah No 32 Tahun 2002 berusaha kembali ke Desa dengan cara perlahan-lahan karena susah menyatukan paham, visi dan misi dalam melaksanakan pembangunan desa.

Berdasarkan Undang-undang No 32 Tahun 2004 bahwa desa mendapat pengakuan sebagai pemerintah yang paling rendah, tetapi diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri. Dalam Undang-undang No 32 Tahun 2004 pasal 6 menyatakan bahwa desa atau nama lain merupakan satu kesatuan dari pemerintah yang terendah dalam sistem pemerintahan nasional.

Berdasarkan peraturan pemerintah No 72 tahun 2007 tentang peraturan pemerintahan desa menjadi dasar yang lebih kuat dalam menjalankan pemerintahan pada tingkat terendah yaitu desa.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 53 tahun 1999, lembaran Negara Republik Indonesia nomor 186 tahun 1999, tambahan Lembaran Negara Nomor 3907, maka pada tanggal 12 Oktober 1999, pemerintah melalui Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden Republik Indonesia meresmikan pembentukan kabupaten Rokan Hulu sebagai suatu Kabupaten definitif.

Dengan diresmikannya Kabupaten Rokan Hulu sebagai daerah kabupaten, kemudian ditindaklanjuti dengan pembentukan pemerintahan, dimana dalam pelaksanaan pemerintah daerah ditunjuk dan diangkatlah kepala daerah kabupaten yang disebut Bupati sebagai badan eksekutif daerah. Bupati selaku kepala daerah berwenang untuk mengangkat Sekretaris daerah dan pembentukan dinas serta instansi perangkat daerah lainnya yang turut membantu pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah, khususnya perencanaan pembangunan di Kabupaten Rokan Hulu.

Didalam Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu No 31 Tahun 2002 tentang pemerintahan desa dengan berpedoman pada produk hukum yang

diatasnya, Undang-undang No 12 Tahun 1956 tentang pembentukan daerah otonomi Provinsi Sumatera Tengah, Undang-undang No 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah, Undang-undang No 25 Tahun 1999 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, Peraturan Pemerintah tahun 2005 tentang kewenangan pemerintah dan kewenangan provinsi daerah otonom.

Dalam Peraturan Daerah No 31 tahun 2002 dijelaskan juga tentang definisi Desa yaitu kesatuan masyarakat hukum adat dalam kabupaten Rokan Hulu, yang terdiri dari himpunan beberapa suku yang mempunyai wilayah dan batas-batas tertentu dan mempunyai harta kekayaan sendiri, berwenang mengurus rumah tangganya sendiri dan memilih pemerintahannya.

Dengan demikian, dasar landasan hukum Peraturan Daerah No 32 Tahun 2002 tentang pemerintahan Desa di kabupaten Rokan Hulu amat kuat, terlepas dari soal apakah kelak bisa diaplikasikan dengan baik atau tidak dalam tataran kehidupan di Desa-desa di kabupaten Rokan Hulu tentu hal tersebut menjadi persoalan yang berbeda.

Salah satu Desa yang terdapat di Kabupaten Rokan Hulu adalah Desa Mahato Sakti Kecamatan Tambusai Utara yang terdiri dari beberapa Dusun, yaitu: Dusun Tri Sakti, Jaya Sakti, Mompa, Mekar Sakti, Suka Sari, Suka Makmur. Setiap dusun dipimpin oleh seorang kepala dusun dipilih oleh seluruh masyarakat yang ada dalam desa tersebut dengan masa jabatan enam tahun dan dapat dipilih kembali untuk satu periode berikutnya.

Kepala Desa dalam menjalankan pemerintahan dilakukan bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai perwakilan masyarakat desa dalam

struktur pemerintahan diharapkan Kepala Desa sebagai pusat kekuasaan tetap tidak lepas dari kontrol masyarakat yang dipimpin karena Kepala Desa dipilih dan diangkat oleh masyarakat Desa sendiri.

Sebagaimana diatur dalam undang-undang No 32 Tahun 2004 pasal 19 tentang pemerintahan Daerah, Kepala Desa mempunyai tugas:

- a. Penyelenggara Pemerintahan
- b. Penyelenggara Pembangunan
- c. Penyelenggara Kemasyarakatan

Dari tugas kepala Desa tersebut terlihat salah satu tugas kepala desa adalah menyelenggarakan kegiatan pembangunan. Dalam konteks pembangunan ini maka kepala desa melakukan musyawarah bersama Badan Permusyawaratan Desa, LSM, salah satu kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah Desa adalah menyusun rencana pembangunan selama satu tahun.

Perencanaan pembangunan yang dilaksanakan pada dasarnya merupakan hasil perencanaan dari bawah keatas melalui tahap-tahap penyusunan disemua tingkat pemerintah Desa/ kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, sampai tingkat nasional. Adapun jadwal pelaksanaan Musyawarah tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

**Tabel I.1.**  
**Jadwal Kegiatan Musyawarah Pembangunan**  
**Desa Mahto Sakti Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu.**

No	Tgl Kegiatan	Jenis Kegiatan	Keterangan
1	2 Februari 2010	Musyawarah Bersama Masyarakat Untuk Mendapatkan Usulan Pembangunan	Terlaksana
2	20 Februari 2010	Musyawarah Bersama Tokoh Masyarakat Untuk Merumuskan Usulan Masyarakat	Terlaksana
3	3 Maret 2010	Musyawarah Berasama BPD untuk Menentukan Keputusan	Terlaksana
4	5 Mei 2010	Musyawarah Pembangunan Tingkat Kecamatan	Terlaksana

Sumber: *Kantor Desa Mahato Sakti 2011*

Berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui bahwa musyawarah pembangunan yang dilaksanakan pada ditingkat desa sudah maksimal dan dilaksanakan tepat pada waktu yang telah ditentukan. Akan tetapi dalam pelaksanaan pembangunan yang telah direncanakan masih banyak kekurangan-kekurangan. Hal ini disebabkan pelaksanaan kepemimpinan kepala desa dalam melaksanakan pembangunan kurang maksimal. Walaupun telah terpenuhinya kebutuhan dana yang diperlukan tetapi program-program yang telah direncanakan tidak dapat dilaksanakan sepenuhnya. Sehingga dengan keadaan seperti ini masyarakat merasa tidak diperhatikan oleh kepala desa tersebut.

Kepala Desa dalam melaksanakan pembangunan didesa memiliki program-program yang telah disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa, Tokoh Masyarakat, LSM dan kepala Dusun. Dalam hal ini kepala desa sebagai penggerak pembangunan mengharapkan saran dan usulan masyarakat tentang rencana tahunan pembangunan desa. Hal ini untuk menghindarkan ketidak

puasan masyarakat terhadap pembangunan yang akan dilaksanakan. Jumlah dana yang diperlukan dalam pelaksanaan pembangunan seluruh program-program pemerintah desa adalah sebesar: Rp. 195.350.000 ( seratus sembilan puluh lima juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah ) . Dari jumlah dana yang masuk kepada pemerintah desa yang berasal dari masyarakat dan pemerintah Kabupaten Rokan Hulu dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

**Tabel. I.2.**  
**Sumbangan Partisipasi Masyarakat untuk Pembangunan**  
**dari Bulan Maret Hingga Bulan Mei 2010**

No	Tanggal	Jenis Sumbangan	Jumlah
1	1 Maret 2010	Sumbangan Dari Agen Kelapa Sawit Dan Agen Karet	Rp 8.350.000
2	5 April 2010	Sumbangan Dari Masyarakat 6 Dusun	Rp 5.400.000
3	15 Mei 2010	Sumbangan Dari Masyarakat 6 Dusun	Rp 4.730.000
4	29 Mei 2010	Sumbangan Dari Agen Kelapa Sawit Dan Agen Karet	Rp 6.385.000
Jumlah			Rp 24.865.000

Sumber: *Kantor Kepala Desa Mahato Sakti 2011*

Jumlah sumbangan yang berasal dari masyarakat Rp. 24.865.000 (Dua Puluh Empat Juta Delapan Ratus Enam Puluh lima Ribu Rupiah). Jumlah dana tersebut dikumpul sejak bulan Maret hingga bulan Mei 2010. Melihat dari jumlah sumbangan masyarakat tersebut dapat diketahui bahwa partisipasi masyarakat sangatlah tinggi. Akan tetapi yang terjadi dilapangan apresiasi tersebut tidak

dimanfaatkan dengan baik oleh kepala desa sehingga banyak masyarakat yang kecewa terhadap pelaksanaan pembangunan di Desa Mahato Sakti Kecamatan Tambusai Utara. Sedangkan dana yang bersal dari pemerintah daerah Kabupaten Rokan Hulu Rp. 135.000.000 ( Seratus Tiga Puluh Lima Juta Rupiah). Dana tersebut dapat dilihat dari tabel berikut:

**Tabel 1.3.**  
**Bantuan Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu**  
**Sejak Bulan April Hingga Bulan Juni 2010.**

No	Tanggal	Jenis Sumbangan	Jumlah
1	12 April 2010	Bantuan Tahap Awal untuk pembangunan infrastruktur	Rp. 75.000.000
2	5 Mei 2010	Bantuan Tahap Akhir untuk Pembangunan Infrastruktur Desa	Rp. 60.000.000
Jumlah			Rp 135.000.000

*Sumber: Kantor Kepala Desa Mahato Sakti 2011*

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa bantuan pembangunan yang bersal dari pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu sangat besar. Sehingga dengan bantuan tersebut diharapkan agar kiranya program pembangunan dapat berjalan sesuai rencana dan dapat dilaksanakan dan dapat diselesaikan sesuai waktu yang ditentukan. Dalam hal ini masyarakat merasa kecewa terhadap kepemimpinan kepala desa sekarang dikarenakan biaya tersebut tidak tepat sasaran. Sehingga banyak pembangunan yang telah direncanakan tidak dapat diselesaikan sesuai target.

Masyarakat dalam mengawasi pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah merasa kurang puas terhadap kepemimpinan kepala desa sekarang. Hal ini masyarakat menumpahkan rasa kekecewaanya dengan cara tidak mau merawat infrastruktur yang telah selesai dibangun oleh pemerintah tersebut. Disamping itu masyarakat enggan untuk memberikan aspirasinya kepada pemerintah desa hal ini disebabkan kurangnya tanggapan pemerintah desa dalam menerima aspirasi masyarakat setempat. Oleh karena itu diharapkan kepada kepala desa agar kiranya dapat menjaga

Adapun rencana pembangunan dan realisasi yang telah dilaksanakan pada tahun 2010 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

**Tabel I.3**  
**Program Tahunan Kegiatan Perencanaan Pembangunan**  
**Desa Mahato Sakti Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu**  
**Pada Tahun Anggaran 2010**

No	Proyek	Target	Keterangan (lokasi)	Lokasi/Dusun	Realisasi
1	Pengerasan Jalan	2.000 M	Desa Mahato Sakti	Jl. Lintas Mahato Sakti	Tidak Terealisasi
2	Pemasangan Intalasi Listrik PLTD	300 KK	Desa Mahato Sakti	Jl Imam Bonjol Dusun Mekar Sakti	Tidak Terealisasi
3	Rehab Pembangunan Masjid Al-Falah	1 Unit	Desa Mahato Sakti	Dusun Jaya Sakti	Terealisasi 55%
4	Rehab Pasar Selasa	1 Unit	Desa Mahato Sakti	Jl. Tuanku Tambusai Dusun Suka Sari	Tidak Terealisasi
5	Pembuatan Jembatan	1 Unit	Desa Mahato Sakti	Jl. Sudirman Dusun Suka Makmur	Terealisasi 100%
6	Rehab Pembangunan MDA Al-Ikhlas	1 Unit	Desa Mahato Sakti	Jl. Kartini Dusun Momp	Terealisasi 100%

*Sumber : Kantor Kepala Desa Mahato Sakti Tahun 2011*



Berdasarkan program-program tahunan yang direncanakan oleh pemerintah Desa Mahato Sakti Kecamatan Tambusai Utara serta hasil dari realisasinya dapat dilihat bahwa realisasi pembangunan yang diharapkan oleh masyarakat hanya tercapai 45% (empat puluh lima persen). Sehingga dalam hal ini masyarakat merasa kecewa terhadap kepemimpinan kepala Desa sekarang. Hal ini dikarenakan dana pembangunan tersebut bukan hanya bersal dari pemerintah daerah tetapi menggunakan dana yang berasal dari sumbangan masyarakat setempat.

Selain fenomena diatas terlihat indikasi bahwa kepemimpinan Kepala Desa Mahato Sakti bergeser dari demokratis ke gaya otoriter. Hal ini terlihat mulai dari pelaksanaan dan penetapan pembangunan yang bukan menjadi kebutuhan prioritas msyarakat desa. Sehingga hal ini terkesan dipaksakan dalam pelaksanaannya. Hal ini berbeda dengan masyarakat desa yang sudah terbiasa demokrasi dalam pengambilan keputusan. Walaupun dalam pengambilan keputusan tersebut melibatkan masyarakat tetapi usulan-usulana masyarakat yang sangat penting tidak ditanggapi oleh kepala desa.

Berdasarkan kenyataan dilapangan tersebut penulis menemukan hal-hal yang tidak sesuai dengan konsep kepemimpinan. Hal ini disebabkan kurangnya nilai Kepemimpinan Kepala Desa dalam merencanakan dan melaksanakan program program pembangunan di desa mahato sakti kecamtan tambuasi utara.

Peranan kepala desa dalam menggerakkan partisipasi masyarakat dalam mensukseskan pembangunan sangat penting sekali, sehingga kepala desa harus

berusaha sekuat kemampuan untuk mengajak masyarakat agar berpartisipasi dalam melaksanakan pembangunan yang akan dilaksanakan. Pada saat ini kepala desa mahato sakti dalam mengajak masyarakat untuk berpartisipasi masih kurang dan perlu ditingkatkan. Hal ini berdasarkan data yang diperoleh penulis untuk menunjukkan partisipasi masyarakat. Adapun tingkat partisipasi masyarakat dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel I.4**  
**Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Pembangunan**

No	Jenis kegiatan	Tingkat partisipasi masyarakat
1.	Gotong royong pembuatan parit jalan	40%
2.	Gotong royong pembangunan masjid	50%
3.	Gotong royong perbaikan jalan	35%

*Sumber: Kotor Kepala Desa Mahato Sakti 2011*

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa partisipasi masyarakat dalam bergotong royong masih sangat rendah dan perlu ditingkatkan. Oleh karena itu diharapkan kepada kepala desa agar berusaha mengajak seluruh elemen masyarakat agar dapat berpartisipasi dalam setiap kegiatan pembangunan yang dilaksanakan guna mempercepat pembangunan tersebut. Disamping itu, kepala desa harus mampu membuat gagasan agar yang dapat menarik kepedulian masyarakat terhadap pembangunan di desa tersebut.

Dari fenomena kepemimpinan kepala Desa di Desa Mahato sakti Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu maka penulis tertarik untuk mengambil judul: **"ANALISIS FUNGSI KEPEMIMPINAN KEPALA DESA DALAM PEMBANGUNAN DI DESA MAHATO SAKTI KECAMATAN TAMBUSAI UTARA KABUPATEN ROKAN HULU"**.

### **1.2. Perumusan Masalah**

Unsur pimpinan baik selaku pimpinan atau motivator dituntut agar mampu menerapkan teknik-teknik memimpin secara tepat dan benar, oleh karena itu penelitian dirumuskan kepada:

1. Bagaimana fungsi kepemimpinan Kepala Desa (Studi di Desa Mahato Sakti Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu)
2. Kendala-kendala apa saja yang dihadapi kepala desa dalam pelaksanaan pembangunan.

### **1.3. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian**

#### **1. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan:

- a. Untuk menganalisa fungsi kepemimpinan kepala desa terhadap pelaksanaan pembangunan di desa mahato sakti kecamatan tambusai utara kabupaten rokan hulu.
- b. Untuk mengetahui hambatan-hambatan dalam pelaksanaan pembangunan di desa mahato sakti kecamatan tambusai utara kabupaten rokan hulu.

## 2. Kegunaan Penelitian

- a. Sumbangan pemikiran bagi mahasiswa ilmu sosial pada umumnya dan jurusan Ilmu Administrasi Negara khususnya dalam pengembangan kajian ilmu administrasi.
- b. Sebagai bahan informasi dan data skunder bagi kalangan akademis lainya yang akan melaksanakan penelitian pada kasus yang sama.

## **BAB II**

### **TELAAH PUSTAKA DAN KERANGKA PIKIR**

#### **2.1. Konsep Kepemimpinan**

Kepemimpinan merupakan inti dari manajemen karena kepemimpinan merupakan motor penggerak bagi sumber daya dan alat-alat, manusia dan alat lainnya dalam suatu organisasi. Demikian pentingnya peranan kepemimpinan dalam usaha mencapai tujuan suatu organisasi sehingga dapat dikatakan bahwa sukses atau kegagalan yang dialami oleh organisasi sebagian besar ditentukan oleh kualitas pemimpin yang dimiliki oleh orang-orang yang diserahi tugas memimpin dalam organisasi itu.

Siagian (2004;30). Karena pada hakikatnya seorang pemimpin ialah orang yang mempunyai bawahan. Sukses tidaknya suatu organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan tergantung bagaimana cara mereka memimpin organisasinya.

Hadari dan Martini (2006:21) kepemimpinan merupakan seni menempatkan bakat sebagai yang penting dan berpengaruh besar terhadap kemampuan mewujudkannya. Bakat kepemimpinan seperti bakat lain yang dimiliki setiap orang namun berbeda kualitas dan kuantitasnya, antara yang satu dengan yang lainnya, berdasarkan pendapat ini berarti kepemimpinan akan berlangsung efektif dan efisien ditangan orang-orang yang kuantitas bakatnya besar dan kualitasnya tinggi.

Kepemimpinan merupakan cabang dari kelompok ilmu administrasi khususnya administrasi negara. Sedangkan ilmu administrasi adalah ilmu sosial dan merupakan salah satu perkembangan dari ilmu filsafat. Kepemimpinan dimaksudkan dalam kategori " ilmu terapan" dan ilmu sosial sebab prinsip-prinsip dan teorinya diharapkan dapat bermanfaat bila dilaksanakan dalam meningkatkan taraf hidup manusia.

Kartono (1991:15) kepemimpinan ialah kemampuan untuk memberikan pengaruh yang konstruktif kepada orang lain untuk melakukan sesuatu usaha mencapai tujuan yang sudah dicanangkan.

Selain itu juga kepemimpinan dapat diartikan sebagaimana kemampuan seseorang untuk mendorong atau mempengaruhi sejumlah orang atau bawahan. Bahwa sesungguhnya efektivitas kepemimpinan seseorang pada akhirnya dinilai dengan menggunakan kemampuan dalam mengambil keputusan sebagai kriteria utama.

Kepemimpinan menurut Orndway Tead (dalam Sutarto, 1991:12) kemampuan untuk mengajak atau mengarahkan orang-orang tanpa memakai kekuatan formal jabatan luar.

Sedangkan pengertian dari kepemimpinan itu sendiri menurut, Harold Koontz dan Cryill O'Donnell (1972 dalam Sutarto 2006:6), menyatakan bahwa kepemimpinan adalah seni membujuk bawahan untuk menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan dengan semangat keyakinan.

Menurut Franklin G. More (1958 dalam Sutarto 2006:7) menyatakan kepemimpinan adalah membuat orang-orang bertindak sesuai dengan keinginan pimpinan.

Selain itu Hadari dan Martini, (2006:15) mendefinisikan kepemimpinan dapat diartikan sebagai kemampuan mempengaruhi, mengarahkan dan membimbing perasaan, pikiran dan tingkah laku orang lain agar terdorong mengembangkan kreativitas dan inisiatif dalam melaksanakan kegiatan yang terarah pada pencapaian tujuan bersama.

Hadari dan Martini (2006:15) menjelaskan unsur-unsur yang ada didalam kepemimpinan yaitu:

1. Adanya seseorang yang berf
2. Fungsi memimpin, yang disebut pemimpin
3. Adanya organisasi yang dipimpin
4. Adanya kegiatan menggerakkan orang lain yang dilakukan dengan mempengaruhi dan mengarahkan perasaan, pikiran dan tingkah lakunya.
5. Adanya tujuan yang hendak dicapai, baik yang dirumuskan secara sistematis maupun bersifat seketika.
6. Berlangsung berupa proses didalam kelompok / organisasi, baik besar dengan banyaknya maupun kecil dengan sedikit orang-orang yang dipimpin.

Menurut Permadi (1996:12) kepemimpinan ialah kegiatan untuk mempengaruhi orang lain, agar mau bekerjasama untuk mencapai tujuan yang diinginkan.

Sedangkan (Riberru,2003:2) mendefenisikan kepemimpinan adalah memengantar seseorang atau sekelompok orang ketujuan, sambil menggunakan sarana yang ada sambil berpegang pada tata susila bersama.

Dari beberapa pengertian kepemimpinan yang disebutkan oleh para ahli diatas dapat diambil intisarnya yaitu ada dua macam yang dominan yaitu mempengaruhi dan saling pengaruh. Perbedaan antara mempengaruhi mengandung kesan searah, sedang saling penagruh mengandung makna timbal balik (Sutarto.2006:25) menegaskan definisi dari kepemimpinan yang mudah dipahami adalah rangkaian kegiatan penataan berupa kemampuan mempengaruhi prilaku orang lain dalam situasi tertentu agar bersedia bekerja sama untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditentukan.

## **2.2. Ciri-ciri Kepemimpinan yang Baik**

Selanjutnya menurut Siagian (1989:39) dapat diketahui bahwa tugas terpenting dan terutama pemimpin aialah untuk memimpin orang, memimpin pelaksanaan pekerjaan, dan menggerakkan sumber-sumber material, maka untuk melaksanakan tugas dengan baik seorang pemimpin harus memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

1. Memiliki kondisi fisik yang sesuai dengan tugasnya
2. Berpengetahuan luas
3. Mempunyai keyakinan bahwa organisasi akan berhasil mencapai tujuan yang telah ditetapkan melalui dan berkat kepemimpinanya



4. Mengetahui dengan jelas sifat hakiki dan kompleksitas dari pada tujuan yang hendak dicapai
5. Memiliki stamina (daya kerja) yang besar
6. Gemar dan cepat mengambil keputusan
7. Adil dalam memperlakukan bawahan
8. Objektif dalam arti dapat menguasai emosi dan lebih banyak mempergunakan rasio
9. Menguasai prinsip-prinsip human relation
10. Menguasai teknik berkomunikasi
11. Dapat dan mampu bertindak sebagai penasehat, guru dan kepala terhadap bawahan
12. Mempunyai gambaran yang menyeluruh tentang semua aspek kegiatan organisasi

Selain itu Ordway Tead dalam Winardi (2000:83) menyebutkan sejumlah sifat yang dianggap perlu dimiliki oleh seorang pemimpin adalah:

1. Energi, fisik, syaraf
2. Sifat mengenai tujuan dan arah
3. Sifat ramah dan efeksi
4. Anthusiasme
5. Integritas
6. Kemampuan teknis
7. Dapat mengambil keputusan
8. Intelegensi

9. Kemampuan untuk mengarahkan sesuatu

10. Kepercayaan

Proses atau rangkaian kegiatan menggerakkan itu berarti juga menuntun dan membimbing agar seseorang pemimpin atau sejumlah orang melakukan suatu kegiatan yang dikehendaki pemimpin atau yang sesuai dengan tujuan bersama. Kegiatan itu berarti juga kemampuan memotivasi seseorang atau sejumlah orang agar bersedia melakukan sesuatu.

Dari uraian kepemimpinan Riberru (2003:2) mengatakan bahwa, orang giat memimpin karena mempunyai kemampuan untuk itu karena mampu memimpin orang lalu dihormati, disegani dan karena memiliki wibawa. Kepemimpinan digunakan dalam tiga hal yaitu:

1. Usaha/ kegiatan memimpin
2. Kemampuan menjalankan usaha tersebut
3. Wibawa yang menyebabkan orang dianggap mampu memimpin

Kepemimpinan adalah masalah relasi dan pengaruh antara pemimpin dengan yang dipimpin. Kepemimpinan tersebut muncul dan berkembang sebagai hasil interaksi otomatis diantara pemimpin dan individu-individu yang dipimpin. Kepemimpinan bisa berfungsi atas dasar kekuasaan pemimpin untuk mengajak, mempengaruhi, dan menggerakkan orang lain untuk melakukan sesuatu demi pencapaian satu tujuan.

Kartono (1991:16) menjelaskan bahwa teori yang menonjol dalam menjelaskan kemunculan pemimpin adalah:

1. Teori Genetis

- Pemimpin itu tidak dibuat, akan tetapi lahir jadi pemimpin oleh bakat-bakatnya yang luar biasa sejak lahirnya.
- Dia ditakdirkan lahir jadi pemimpin, dalam situasi kondisi yang bagaimana juga.
- Secara filsafi, teori tersebut menganut pandangan yang deterministik dan fatalistik.

## 2. Teori Sosial

- Pemimpin itu harus disiapkan dan dibentuk
- Setiap orang bisa jadi pemimpin, melalui usaha penyiapan dan pendidikan.

## 3. Teori Ekologis

- Seorang akan sukses menjadi pimpinan, bila sejak lahirnya dia telah memiliki bakat-bakat kepemimpinan, dan bakat ini sempat dikembangkan melalui pengalaman dan usaha pendidikan, juga sesuai dengan tuntunan lingkungan/ekologisnya.

Menurut Wahjsumidjo (dalam Kartono,1990:31) menentukan watak dan tipe pemimpin atas tiga pola dasar yaitu:

- Berorientasi tugas (*task orientation*)
- Berorientasi hubungan kerja (*relationship orientation*)
- Berorientasi hasil yang efektif (*effectiveness orientation*)

Siagian (2003:46) pendekatan yang lumrah untuk digunakan dalam menilai kemampuan seseorang mengambil keputusan yang efektif ialah pendekatan yang memenuhi syarat sebagai berikut:

1. Kualitatif, yaitu mutu keputusan yang diambil

2. Ketepatan model dalam mengambil keputusan yang dipilih sesuai dengan situasi kondisi yang dihadapi
3. Ketepatan teknik pengambilan keputusan, yang digunakan sesuai dengan sifat permasalahan yang ingin dipecahkan
4. Penerimaan para pelaksana keputusan tersebut sesuai dengan interpretasi yang bersifat subjektif
5. Terbukti mendekatkan organisasi kepada tujuan yang telah ditetapkan.

Keberhasilan pemimpin karena ia memiliki sifat-sifat Kepemimpinan (*leadership*) yaitu motivasi peranan motivasi disini dipengaruhi berbagai faktor antara lain:

1. Kematangan (*nature*)
2. Latar belakang kehidupan (*social back ground*)
3. Usia/ umur (*ages*)
4. Sosial dan budaya
5. Lingkungan

Siagian (2003:75) salah satu konsekuensi yang logis dari kenyataan yang ada bahwa cirri-ciri dari kepemimpinan digunakan atau ditonjolkan dengan bobot intensitas yang berbeda artinya berbagai cirri yang dimiliki oleh seseorang pemimpin tidak seluruhnya digunakan secara serentak dengan penggunaan yang sama.

Siagian (2003:75) menyatakan bahwa ciri-ciri kepemimpinan yang ideal adalah:

1. Pengetahuan umum yang luas

2. Keterampilan berkomunikasi secara efektif
3. Keterampilan mendidik
4. Rasuonalitas
5. Objektivitas
6. Kemampuan membedakan yang umum dengan yang khusus
7. Keteladanan

Sedangkan tipe kepemimpinan menurut siagian (2003:31) bahwa kepemimpinan terdiri dari:

- a. Tipe otokratik
- b. Tipe patenalistik
- c. Tipe kharismatik
- d. Tipe laissez faire
- e. Tipe demokratik

Kemudian Chester I. Barnand dalam Winardi (2000:84) menyatakan bahwa kepemimpinan itu memiliki dua aspek yaitu:

1. Aspek superioritas individual dalam bidang teknik kepemimpinan, seseorang yang menonjol dalam hal fisik, skill, teknologi, persepsi, pengetahuan, ingatan, dan imajinasi akan menimbulkan perasaan dikagumu dan ia dapat memimpin bawahan
2. Aspek superioritas dalam hal, determinasi, presistensi, ketahan dan keberanian

### 2.3. Fungsi Kepemimpinan

Tugas pokok kepemimpinan yang berupa mengantarkan, mengelompokkan, memberi petunjuk, mendidik, membimbing an sebagainya, yang secara singkat menggerakkan enam M. agar para bawahan mengikuti jejak pemimpin mencapai tujuan organisasi, hanya dapat melaksanakan secara baik bila seorang pemimpin menjalankan fungsinya sebagaimana mestinya. Fungsi – fungsi kepemimpinan adalah sebagai berikut :

#### 1. Fungsi Perencanaan

Seorang pemimpin perlu membuat perencanaan yang menyeluruh bagi organisasi dan bagi diri sendiri selaku penanggung jawab tercapainya tujuan organisasi. Manfaat – manfaat tersebut antara lain :

- a. Perencanaan merupakan hasil pemikiran dan analisa situasi dalam pekerjaan untuk memutuskan apa yang akan dilakukan
- b. Perencanaan berarti pemikiran jauh ke depan disertai keputusan – keputusan yang berdasarkan atas fakta – fakta yang diketahui
- c. Perencanaan berarti proyeksi atau penempatan diri ke situasi pekerjaan yang akan dilakukan dan tujuan atau target yang akan dicapai.

Perencanaan meliputi dua hal, yaitu :

- a. Perencanaan tidak tertulis yang akan digunakan dalam jangka pendek, pada keadaan darurat, dan kegiatan yang bersifat terus menerus.
- b. Perencanaan tertulis yang akan digunakan untuk menentukan kegiatan – kegiatan yang akan dilakukan atas dasar jangka panjang dan menentukan prosedur – prosedur yang diperlukan.

Setiap rencana yang baik akan berisi :

- a. Maksud dan tujuan yang tetap dan dapat dipahami
- b. Penggunaan sumber – sumber secara tepat
- c. Cara dan prosedur untuk mencapai tujuan tersebut

## 2. Fungsi memandang ke depan

Seorang pemimpin yang senantiasa memandang ke depan berarti akan mampu mendorong apa yang akan terjadi serta selalu waspada terhadap kemungkinan. Hal ini memberikan jaminan bahwa jalannya proses pekerjaan ke arah yang dituju akan dapat berlangsung terus menerus tanpa mengalami hambatan dan penyimpangan yang merugikan. Oleh sebab seorang pemimpin harus peka terhadap perkembangan situasi baik di dalam maupun diluar organisasi sehingga mampu mendeteksi hambatan-hambatan yang muncul, baik yang kecil maupun yang besar.

## 3. Fungsi pengembangan loyalitas

Pengembangan kesetiaan ini tidak saja diantara pengikut, tetapi juga untuk para pemimpin tingkat rendah dan menengah dalam organisasi. Untuk mencapai kesetiaan ini, seseorang pemimpin sendiri harus memberi teladan baik dalam pemikiran, kata-kata, maupun tingkah laku sehari – hari yang menunjukkan kepada anak buahnya pemimpin sendiri tidak pernah mengingkari dan menyeleweng dari loyalitas segala sesuatu tidak akan dapat berjalan sebagaimana mestinya.

#### 4. Fungsi Pengawasan

Fungsi pengawasan merupakan fungsi pemimpin untuk senantiasa meneliti kemampuan pelaksanaan rencana. Dengan adanya pengawasan maka hambatan – hambatan dapat segera diketemukan, untuk dipecahkan sehingga semua kegiatan kembali berlangsung menurut rel yang telah ditetapkan dalam rencana .

#### 5. Fungsi mengambil keputusan

Pengambilan keputusan merupakan fungsi kepemimpinan yang tidak mudah dilakukan. Oleh sebab itu banyak pemimpin yang menunda untuk melakukan pengambilan keputusan. Bahkan ada pemimpin yang kurang berani mengambil keputusan. Metode pengambilan keputusan dapat dilakukan secara individu, kelompok tim atau panitia, dewan, komisi, referendum, mengajukan usul tertulis dan lain sebagainya. Dalam setiap pengambilan keputusan selalu diperlukan kombinasi yang sebaik-baiknya dari :

- a. Perasaan, firasat atau intuisi
- b. Pengumpulan, pengolahan, penilaian dan interpretasi fakta-fakta secara rasional – sistematis.
- c. Pengalaman baik yang langsung maupun tidak langsung.
- d. Wewenang formal yang dimiliki oleh pengambil keputusan.

Dalam pengambilan keputusan seorang pemimpin dapat menggunakan metode – metode sebagai berikut :

- a. Keputusan – keputusan yang sifatnya sederhana individual artinya secara sendirian.



- b. Keputusan – keputusan yang sifatnya seragam dan diberikan secara terus menerus dapat diserahkan kepada orang – orang yang terlatih khusus untuk itu atau dilakukan dengan menggunakan komputer.
- c. Keputusan – keputusan yang bersifat rumit dan kompleks dalam arti menjadi tanggung jawab masyarakat lebih baik diambil secara kelompok atau majelis. Keputusan – keputusan yang bersifat rumit dan kompleks sebab masalahnya menyangkut perhitungan – perhitungan secara teknis agar diambil dengan bantuan seorang ahli dalam bidang yang akan diambil keputusannya.

#### 6. Fungsi memberi motivasi

Seorang pemimpin perlu selalu bersikap penuh perhatian terhadap anak buahnya. Pemimpin harus dapat memberi semangat, membesarkan hati, mempengaruhi anak buahnya agar rajin bekerja dan menunjukkan prestasi yang baik terhadap organisasi yang dipimpinnya. Pemberian anugerah yang berupa ganjaran, hadiah, pujian atau ucapan terima kasih sangat diperlukan oleh anak buah sebab mereka merasa bahwa hasil jerih payahnya diperhatikan dan dihargai oleh pemimpinnya.

Di lain pihak, seorang pemimpin harus berani dan mampu mengambil tindakan terhadap anak buahnya yang menyeleweng, yang malas dan yang telah berbuat salah sehingga merugikan organisasi, dengan jalan memberi celaan, teguran, dan hukuman yang setimpal dengan kesalahannya. Untuk melaksanakan fungsi fungsi ini sebaik- baiknya, seorang pemimpin perlu menyelenggarakan

daftar kecakapan dan kelakuan baik bagi semua pegawai sehingga tercatat semua hadiah maupun hukuman yang telah diberikan kepada mereka.

#### **2.4. Pemerintahan Desa**

Menurut Ndaraha (1985:2) menyatakan bahwa pemerintah desa adalah pembangunan yang sepanjang prosesnya masyarakat desa yang bersangkutan diharapkan berpartisipasi aktif dan dikelola oleh tingkat desa. Mengenai partisipasi menurut Bintoro (1984:25) menyatakan bahwa pembangunan yang dilaksanakan di wilayah pemerintahan terendah yaitu desa atau kelurahan terutama pembangunan desa yang terpenting yaitu diikuti serta masyarakat didalam pembangunan desa atau kelurahan tersebut.

Disamping itu kiranya dapat juga dilihat dalam UU No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah dalam Bab III mengenai Pembentukan Susunan Daerah. Didalam undang-undang no 32 tahun 2004 Pasal 4 dikatakan bahwa:

1. Dalam rangka pelaksanaan asas desentralisasi dibentuk dan disusun daerah provinsi, daerah Kecamatan Daerah Kota yang berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat.
2. Daerah-daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing berdiri sendiri dan tidak mempunyai hubungan hirarki satu sama lain.

Kemudian didalam Undang-undang No 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah Pasal 5 disebutkan bahwa

1. Daerah dibentuk berdasarkan pertimbangan kemampuan, potensi daerah sosial budaya, sosial politik, jumlah penduduk, luas daerah dan pertimbangan lain yang memungkinkan terselenggaranya otonomi daerah.
2. Pembentukan, nama, batas dan ibu kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan undang-undang.

Sedangkan Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu No 32 Tahun 2002 tentang pemerintahan desa dikatakan dalam pasal 3 tentang pembentukan desa harus memenuhi syarat:

- a. Jumlah penduduk 2.000 jiwa atau 400 KK atau lebih
- b. Luas wilayah minimal 600 Ha
- c. Wilayah kerja dapat dijangkau dan memiliki jaringan perhubungan antar dusun.

## **2.5. Tugas dan Fungsi Kepala Desa**

Menurut Undang-undang No. 32 Tahun 2004, adapun kedudukan dan fungsi kepala desa adalah.

- a. Kedudukan Kepala Desa
  1. Sebagai alat pemerintah
  2. Sebagai alat pemerintah daerah
  3. Sebagai alat pemerintah desa
- b. Tugas Kepala Desa
  1. Mengurus kegiatan dalam rumah tangganya
  2. Menjalankan urusan pemerintahan dan pembinaan masyarakat

3. Menumbuhkan dan mengembangkan semangat jiwa gotong royong

c. Fungsi Kepala Desa

1. Mengurus kegiatan dalam rumah tangganya masing-masing
2. Menggerakkan partisipasi masyarakat
3. Melaksanakan tugas dari pemerintahan di atasnya
4. Menjaga keamanan ketertiban masyarakat

Sedangkan Dalam Peraturan Daerah kabupaten Rokan Hulu No 32 Tahun 2002 pasal 9 dikatakan bahwa kewenangan pemerintah desa antara lain:

- a. Urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hal asal-usul desa
- b. Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang diserahkan pengaturannya kepada desa
- c. Tugas pembantuan dari pemerintah
- d. Urusan pemerintah lainnya

Selanjutnya dalam pasal 101 UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah tentang tugas dan kewajiban Kepala desa adalah:

1. Memimpin dan menyelenggarakan Pemerintahan Desa
2. Membina Kehidupan Masyarakat Desa
3. Membina Perekonomian Desa
4. Memelihara Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat Desa
5. Mendamaikan perselisihan masyarakat di Desa

Kemudian dalam pasal 102 menyatakan bahwa:

1. Kepala Desa bertanggung jawab kepada rakyat melalui Badan Perwakilan Desa (BPD)

## 2. Menyampaikan laporan mengenai pelaksanaan tugasnya pada Bupati

Dalam Peraturan Pemerintah No 72 Tahun 2005 menjelaskan Tugas, Wewenang, Kewajiban dan Hak Kepala Desa:

Dalam peraturan pemerintah No 72 Tahun 2005 Pasal 14 menjelaskan tugas kepala desa diantaranya

- (1) Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa mempunyai wewenang :
  - a. memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD;
  - b. mengajukan rancangan peraturan desa;
  - c. menetapkan peraturan desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD;
  - d. menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa mengenai APB Desa untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD;
  - e. membina kehidupan masyarakat desa;
  - f. membina perekonomian desa;
  - g. mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif;
  - h. mewakili desanya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

- i. melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Kemudian dalam peraturan pemerintah No 72 Tahun 2005 Pasal 15 menjelaskan kewajiban kepala desa sebagai berikut:

(1) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 14, Kepala Desa mempunyai kewajiban:

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- c. memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat;
- d. melaksanakan kehidupan demokrasi;
- e. melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang bersih dan bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme;
- f. menjalin hubungan kerja dengan seluruh mitra kerja pemerintahan desa;
- g. menaati dan menegakkan seluruh peraturan perundangundangan;
- h. menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa yang baik;
- i. melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan desa;
- j. melaksanakan urusan yang menjadi kewenangan desa;
- k. mendamaikan perselisihan masyarakat di desa;
- l. mengembangkan pendapatan masyarakat dan desa;

- m. membina, mengayomi dan melestarikan nilai-nilai social budaya dan adat istiadat;
  - n. memberdayakan masyarakat dan kelembagaan di desa; dan
  - o. mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup;
- (2) Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Desa mempunyai kewajiban untuk memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada Bupati/Walikota, memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada BPD, serta menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada masyarakat.
  - (3) Laporan penyelenggaraan pemerintahan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui Camat 1 (satu) kali dalam satu tahun.
  - (4) Laporan keterangan pertanggungjawaban kepada BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan 1 (satu) kali dalam satu tahun dalam musyawarah BPD.
  - (5) Menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat berupa selebaran yang ditempelkan pada papan pengumuman atau diinformasikan secara lisan dalam berbagai pertemuan masyarakat desa, radio komunitas atau media lainnya.

(6) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan oleh Bupati/Walikota sebagai dasar melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa dan sebagai bahan pembinaan lebih lanjut.

(7) Laporan akhir masa jabatan Kepala Desa disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui Camat dan kepada BPD.

Sedangkan dalam Peraturan Daerah No 32 tahun 2002 pasal 12 menyebutkan bahwa tugas kepala desa adalah:

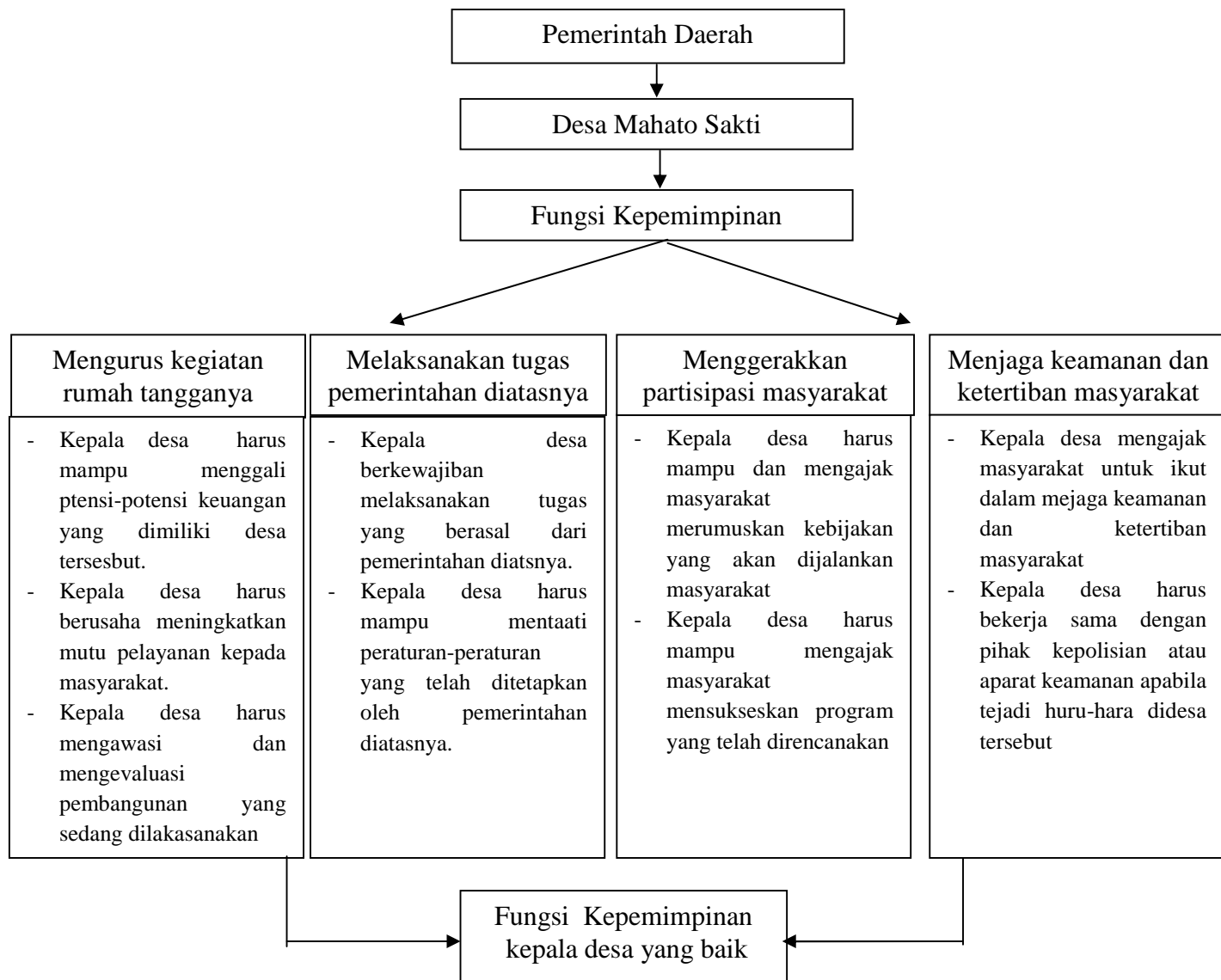
- a. Menyelenggarakan urusan pemerintahan
- b. Menyelenggarakan urusan kemasyarakatan
- c. Menyelenggarakan urusan pembangunan

Dalam pelaksanaan tugas tersebut kepala desa mempunyai wewenang antara lain:

- a. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa
- b. Mengajukan rancangan peraturan desa kepada BPD
- c. Membina kehidupan masyarakat Desa
- d. Menetapkan peraturan desa yang telah mendapat persetujuan BPD
- e. Membina perekonomian desa
- f. Mengkoordinasi pembangunan desa



## 2.6. Kerangka Pemikiran



Sumber: Modifikasi Penelitian 2011

## 2.6 Hipotesis

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas serta kerangka pikiran yang telah diuraikan, maka penulis dapat merumuskan hipotesis serta kesimpulan sementara yang perlu diuji kebenaran” analisis kepemimpinan kepala desa dalam melaksanakan pembangunan di Desa Mahato Sakti Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu”, maka penulis merumuskan:

”Fungsi Kepemimpinan kepala desa mahato sakti dalam pelaksanaan pembangunan berada pada kategori kurang baik”

## 2.7 Defenisi Konsep

Untuk memperoleh pelaksanaan penelitian serta operasional penelitian dan tercipta keseragaman penafsiran maka konsep operasional ini akan diuraikan agar tujuan penelitian ini tepat sasaran:

1. Pimpinan yaitu kepala Desa Mahato Sakti Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu.
2. Desa merupakan pemerintahan terendah yang terdapat di kabupaten Rokan Hulu yang merupakan pemerintahan Desa yang disesuaikan dengan adat istiadat.
3. Kepala Desa merupakan pimpinan pemerintahan Desa
4. Dusun merupakan bagian dari unsur wilayah Desa yang dipimpin oleh seorang Kepala Dusun

5. Badan Permusyawaratan Desa merupakan lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa
6. Penduduk Desa adalah warga negara Indonesia yang bertempat tinggal di desa yang bersangkutan
7. Kepemimpinan Demokratis kepemimpinan ini ditandai oleh adanya struktur yang pengembangannya menggunakan pendekatan pengambilan keputusan yang kooperatif, dibawah kepemimpinan demokratis bawahan cenderung bermoral tinggi dapat bekerja sama, mengutamakan mutu kerja, dan dapat mengarahkan diri sendiri.
8. Kepemimpinan Demokratis ditandai oleh struktur yang penegmbangannya menggunakan pendekatan pengambilan keputusan yang kooperatif, dibawah kepemimpinan demokratis bawahan cenderung bermoral tinggi, dapat bekerja sama, mengutamakan mutu kerja dan dapat mengarahkan diri sendiri.

## **2.8 Indikator Variabel**

Dalam penelitian ini terdapat beberapa indikator yang perlu diuji dan perlu dianalisa terhadap fungsi kepala desa menurut Peraturan Pemerintah No 72 tahun 2005 yaitu:

1. Mengurus kegiatan dalam rumah tangganya
2. Melaksanakan tugas dari pemerintahan diatasnya
3. Menggerakkan partisipasi masyarakat
4. Menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat

## 2.9 Teknik Pengukuran

Dalam mendapatkan gambaran dari batasan penelitian maka perlu ditetapkan ukuran indicator variabel.

### 1. Mengurus kegiatan rumah tangganya

- a. Apabila fungsi kepemimpinan kepala desa dalam pelaksanaan pembangunan desa bila kepala desa dalam mengurus kegiatan rumah tangganya berada pada kategori baik
- b. Apabila fungsi kepemimpinan kepala desa dalam pelaksanaan pembangunan desa bila kepala desa dalam mengurus kegiatan rumah tangganya berada pada cukup baik
- c. Apabila fungsi kepemimpinan kepala desa dalam pelaksanaan pembangunan desa bila kepala desa dalam mengurus kegiatan rumah tangganya berada pada kurang baik

### 2. Melaksanakan tugas dari pemerintahan di atasnya

- a. Apabila fungsi kepemimpinan kepala desa dalam pelaksanaan pembangunan desa bila kepala desa dalam melaksanakan tugas dari pemerintahan di atasnya berada pada kategori baik
- b. Apabila fungsi kepemimpinan kepala desa dalam pelaksanaan pembangunan desa bila kepala desa dalam melaksanakan tugas dari pemerintahan di atasnya berada pada cukup baik
- c. Apabila fungsi kepemimpinan kepala desa dalam pelaksanaan pembangunan desa bila kepala desa dalam menjalankan tugas dari pemerintahan di atasnya berada pada kurang baik

### 3. Menggerakkan partisipasi masyarakat

- a. Apabila fungsi kepemimpinan kepala desa dalam pelaksanaan pembangunan desa bila kepala desa dalam menggerakkan partisipasi masyarakat berada pada kategori baik
- b. Apabila fungsi kepemimpinan kepala desa dalam pelaksanaan pembangunan desa bila kepala desa dalam menggerakkan partisipasi masyarakat diatasnya berada pada cukup baik
- c. Apabila fungsi kepemimpinan kepala desa dalam pelaksanaan pembangunan desa bila kepala desa dalam menggerakkan partisipasi masyarakat berada pada kurang baik

### 4. Menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat

- a. Apabila fungsi kepemimpinan kepala desa dalam pelaksanaan pembangunan desa bila kepala desa dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat berada pada kategori baik
- b. Apabila fungsi kepemimpinan kepala desa dalam pelaksanaan pembangunan desa bila kepala desa dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat berada pada cukup baik
- c. Apabila fungsi kepemimpinan kepala desa dalam pelaksanaan pembangunan desa bila kepala desa dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat berada pada kurang baik

Untuk mempermudah menganalisa data, maka penelitian terhadap pelaksanaan variabel atau indicator dibagi dalam tiga tingkatan atau variasi.

Adapun penilaian tersebut: Baik, Cukup baik, Kurang Baik. Adalah teknik yang dipergunakan dalam variabel penelitian adalah sebagai berikut:

Baik : Jika rata-rata ( persentase ) penilaian terhadap sub indicator yang telah ditetapkan berada pada kategori 67 %

Cukup Baik : Jika rata-rata (persentase) penilaian terhadap sub indicator yang telah ditetapkan berada pada kategori 34-66%

Kurang Baik : Jika rata-rata (persentase) penilaian terhadap sub indicator yang telah ditetapkan berada pada kategori 33 %

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

Untuk memperoleh data dan informasi maka penulis menggunakan metode yang mendukung terlaksananya penelitian ini yaitu:

#### **3.1 Lokasi dan Jenis Penelitian**

Penelitian ini dilakukan pada kantor kepala Desa Mahato Sakti Kecamatan tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu. Dengan alasan utama pemilihan lokasi ini melihat kondisi wilayah yang memiliki 6 Dusun, sehingga memerlukan koordinasi dari Kepala Desa untuk melaksanakan kegiatan proyek pembangunan.

Berkaitan dengan tujuan penelitian adalah untuk menjelaskan tentang fenomena dan fakta sosial yang terjadi secara obyektif di lapangan, maka jenis penelitian yang cocok dengan tujuan penelitian itu adalah deskriptif, yaitu suatu penelitian yang mendeskripsikan tentang kinerja birokrasi pemerintah dilihat dari sudut pendekatan proses.

#### **3.2 Populasi dan sampel**

Keseluruhan obyek yang menjadi sumber data dalam penelitian ini adalah Kepala Desa, Sekretrais Desa, Kaur Pemerintahan, Kaur Pembangunan, Kaur Umum, kepala Dusun. Pemuka masyarakat sebagai bahan perbandingan untuk mengetahui penilaian Masyarakat maka diambil beberapa masyarakat untuk dijadikan sampel terhadap pelaksanaan kepemimpinan Kepala Desa dalam

pembangunan desa di Desa Mahato Sakti kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu.

Teknik yang penulis gunakan dalam penelitian di kantor desa adalah menggunakan teknik *Sensus* Sugiono (2003:96) karena jumlah populasi yang ada pada kantor desa di Desa Mahato Sakti Kecamatan Tambusai Utara relatif sedikit dan mudahnya seluruh responden untuk ditemui dan berada pada tempat yang sama. Sedangkan teknik yang penulis gunakan untuk masyarakat Menggunakan Rumus Sloven menurut Sugiono (2003:96) karena jumlah populasi begitu banyak dan peluang untuk menemui responden begitu sedikit. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dari tabel dibawah ini:

**Tabel III.1.**  
**Populasi dan Sampel Penelitian Tentang Fungsi Kepemimpinan**  
**Kepala Desa Dalam Pembangunan di Desa Mahato Sakti**  
**Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu.**

No	Keterangan	Populasi	Responden	Persentase
1	Kepala Desa	1	1	100%
2	Sekretaris desa	1	1	100%
3	Kaur pemerintahan	1	1	100%
4	Kaur pembangunan	1	1	100%
5	Kaur umum	1	1	100%
6	BPD	13	13	100%
7	Kepala dusun	6	6	100%
Jumlah		24	24	100%

*Sumber: Kantor Kepala Desa 2011*



**Tabel III.2.**  
**Populasi dan Sampel Penelitian Masyarakat Desa Mahato Sakti**

No	Keterangan	Populasi	Responden	Persentase
1	Dusun mekar sakti	511	13	12,6%
2	Dusun jaya sakti	621	16	1,5,5%
3	Dusun Tri sakti	432	11	10,%
4	Dusun suka sari	1064	27	0,83%
5	Dusun suka makmur	721	19	1,24%
6	Dusun mompa	441	11	2,02%
<b>Jumlah</b>		<b>3790</b>	<b>97</b>	<b>2,55%</b>

*Sumber: Kantor Kepala Desa 2011*

Berdasarkan tabel diatas teknik penarikan sampel menggunakan rumus sloven sebagai berikut:

$$n = \frac{N}{1 + N(e)^2}$$

$$n = \frac{3790}{1 + 3790(10\%)^2}$$

$$n = \frac{3790}{38,9}$$

$$n = 97,4$$

Keterangan:

n = Nilai ukuran sampel yang diambil

N = Nilai populasi keseluruhan

e = Nilai kritis

### 3.3 Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Data primer

Yaitu data yang diperoleh dari responden berdasarkan kepada kerangka penelitian dan pihak-pihak yang berkepentingan terhadap permasalahan penelitian berupa informasi tentang bagaimana pelaksanaan kepemimpinan kepala desa terhadap pelaksanaan pembangunan.

## 2. Data sekunder

Yaitu data yang diperoleh langsung dari responden melainkan dari dokumen-dokumen, buku-buku serta hasil-hasil penelitian lainnya yang berkenaan dengan penelitian antara lain:

- a. Gambaran Umum Desa
- b. Struktur organisasi pada kantor desa Desa Mahato Sakti
- c. Uraian tugas kepala desa
- d. Rencana dan realisasi pembangunan di desa Desa Mahato Sakti
- e. Kadaan sosial budaya masyarakat
- f. Keadaan penduduk
- g. Keadaan sarana dan prasarana

## 3.4 Teknik Pengumpulan Data

1. Quisioner yaitu memberikan sejumlah pertanyaan secara tertulis terhadap subyek penelitian pada kantor desa di Desa Mahato Sakti Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu.
2. Observasi yaitu mengadakan pengamatan secara langsung terhadap subyek penelitian pada kantor desa Desa mahato Sakti Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu.

3. Wawancara yaitu mengadakan tanya jawab langsung terhadap subyek penelitian pada masyarakat didesa Mahato Sakti Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu.

### **3.5 Analisis Data**

Tahapan pengolahan atau analisa data setelah terkumpul dari responden adalah :

1. Editing, yaitu peneliti memeriksa seluruh kuesioner yang terkumpul dari responden untuk memastikan kecocokan pengisian sesuai dengan petunjuk pengisian, termasuk disini mengecek kembali ke responden bila ada jawaban yang belum jelas.
2. Tabulasi data, yaitu mencatat semua jawaban responden mulai dari responden pertama sampai responden terakhir.
3. Data yang diperoleh dan dikumpulkan lalu dikelompokkan dan diklasifikasi menurut jenisnya, kemudian diolah kedalam tabel diuraikan dan diberikan pembahasan serta keterangan yang didukung analisa data. Semua hasil pengolahan data tersebut selanjutnya dianalisis dengan analisis deskriptif kualitatif.

## **BAB IV**

### **GAMBARAN UMUM DESA MAHATO SAKTI**

#### **1.1 Luas Batas Wilayah**

Desa Mahato Sakti merupakan daerah dataran tinggi yang mempunyai luas wilayah kurang lebih  $\pm 15\,362$  Ha terdiri dari 6 (enam) dusun yakni: Dusun Mekar Sakti, Dusun Tri Sakti, Dusun Jaya Sakti, Dusun Suka Sari, Dusun Suka Makmur, Dusun Mompas. Setiap daerah yang terbentang dibelahan bumi nusantara tentunya memiliki karakteristik tersendiri yang membuatnya berada tidak sama dengan daerah lain, yakni ditinjau dari sudut geografis daerah bersangkutan. Keadaan geografis Desa Mahato Sakti yang terletak di Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu berbatasan dengan desa-desa sekitarnya yaitu:

- Sebelah Utara Berbatasan dengan Desa Rantau Sakti
- Sebelah barat berbatasan dengan Desa Payung Sekaki
- Sebelah selatan berbatasan dengan Desa Tanjung Medan
- Sebelah timur berbatasan dengan Desa Pagar Mayang

#### **1.2 Keadaan Penduduk**

Masyarakat Desa Mahato sakti merupakan masyarakat yang heterogen, dimana daerah ini dihuni berbagai suku dan memiliki tingkat kecerdasan yang cukup tinggi. Sehingga membuat daerah ini cepat berkembang. Berdasarkan data statistik

pada Kantor Desa Mahato Sakti tahun 2011, jumlah penduduk Desa Mahato Sakti berjumlah 3.825 orang, terdiri dari laki-laki berjumlah 1.937 orang dan perempuan berjumlah 1.888 orang dari 900 Kepala Keluarga (KK). Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel IV.1.**  
**Keadaan Penduduk Desa Mahato Sakti**  
**Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu**

No	Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase
1.	Laki-laki	1.913	51,88%
2.	Perempuan	1.888	48,12%
		3.790	100%

*Sumber: Kantor Kepala Desa Mahato Sakti 2011*

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa jumlah penduduk laki-laki lebih banyak dari pada jumlah penduduk perempuan. Dimana laki-laki berjumlah 1.937 orang dengan persentase 52% sedangkan penduduk perempuan berjumlah 1.888 orang dengan persentase 48%. Dari jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin tersebut mayoritas penduduk pendatang yang berasal dari berbagai daerah yang mengikuti program transmigrasi pada tahun 1997.

### **1.3 Perekonomian**

Melihat dari segi sosial ekonomi masyarakat, Desa Mahato Sakti pada umumnya mempunyai mata pencaharian yang ganda berpariasi petani, pedagang, dan lain-lain. Namun sesuai dengan potensi dan keahlian masyarakat Desa Mahato Sakti, maka kehidupan masyarakat bergerak dibidang pertanian. Sesuai dengan kondisi kehidupan di desa.

Dari tabel berikut dapat dilihat bermacam-macam maka mata pencaharian masyarakat Desa Mahato Sakti.

**Tabel IV.2**  
**Mata Pencaharian Penduduk Desa Mahato Sakti**  
**Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu**

No	Mata Pencaharian	Jumlah	Persentase
1.	Petani	1.112 Orang	64,77 %
2.	Pegawai Negeri Sipil	60 Orang	1,99 %
3.	Pensiunan Pns	12 Orang	1,43 %
4.	Pertukangan	98 Orang	3,25 %
5.	Pedagang	123 Orang	15,61 %
6.	Wiraswasta	230 Orang	12,95 %
Jumlah		1635 Orang	100 %

*Sumber: Kantor Kepala Desa Mahato Sakti 2011*

Dari tabel diatas dapat dilihat mata pencaharian yang paling dominan adalah pertanian dengan jumlah penduduk sebanyak 1.112 orang (64,77%). Sedangkan mata pencaharian sebagai PNS sebanyak 60 orang (1,99%). Untuk pensiunan PNS sebanyak 12 orang (1,43%). Kemudian untuk mata pencaharian dibidang pertukangan sebanyak 98 orang (3,25%). Dan penduduk yang mempunyai profesi sebagai pedagang sebanyak 123 orang (15,61%). Sedangkan penduduk yang berpfofesi sebagai wiraswasta sebanyak 230 orang (12,95%).

#### **1.4 Struktur Organisasi Desa dan Uraian Tugas**

Sebagaimana yang telah diketahui bersama, bahwa desa merupakan organisasi perangkat daerah yang terendah untuk mendukung kelancaran

penyelenggaraan pemerintah ditingkat desa. Desa dipimpin oleh kepala desa yang langsung bertanggung jawab kepada bupati karena sesuai dengan undang-undang No 32 Tahun 2004 pasal 205 ayat 1 bahwa proses awal bahwasanya kepala desa terpilih dan dilantik langsung oleh bupati, selanjutnya desa mengemban serangkaian tugas dan fungsi yang harus dijalankan dalam melayani kepentingan masyarakat.

Dalam rangka melaksanakan tugas-tugas umum pemerintahan desa yang telah ditetapkan, desa memiliki strukturisasi keorganisasian guna menentukan garis kewenangan dan pembagian tugas yang ada secara jelas dan tegas, sehingga terjalin hubungan kerjasama yang mengantarkan kepada pencapaian tujuan pembangunan desa yang diharapkan terutama berkaitan dengan perkembangan desa itu sendiri. Adapun bentuk struktur organisasi pemerintah desa ini adalah organisasi garis, yang mana maksudnya adalah ditandai dengan tanggung jawab dan wewenang berada dalam satu garis langsung dari pucuk pimpinan kepada masing-masing bagian.

### 1. Struktur Organisasi

Untuk melakukan program pemerintah maka perlu ditinjau kepada keadaan desa yang mungkin saja dapat melaksanakan tugas-tugas umum pemerintahan desa atau disuatu desa. Untuk itu perlu ditinjau kembali struktur organisasi yang terdiri dari dua kelembagaan yang berfungsi dengan maksud yang sama yaitu membantu didalam pelaksanaan tugas-tugas umum pemerintahan desa

secara keseluruhan yang dilakukan oleh kepala desa dan BPD serta dibantu oleh perangkat desa. Adapun susunan dari pemerintahan desa adalah:

- a. Pemerintahan Desa terdiri atas:
  1. Kepala Desa
  2. Badan Permusyawaratan Desa
- b. Pemerintahan Desa dibantu oleh:
  1. Sekretaris Desa
  2. Kepala Dusun
- c. Sekretaris Desa terdiri dari:
  1. Sekretaris Desa sebagai pimpinan
  2. Kepala-kepala urusan

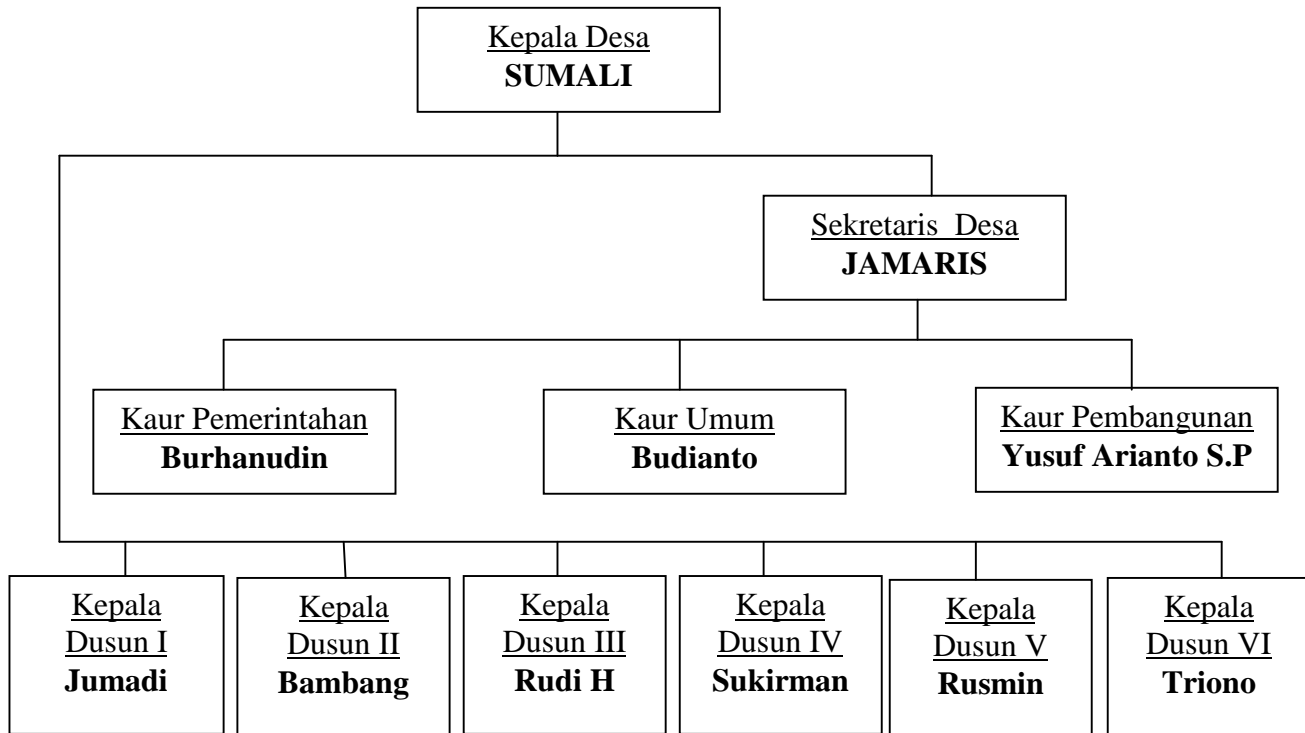
Adapun aparat pemerintah desa di Desa Mahato Sakti Kecamatan Tambusai Utara adalah:

1. Kepala Desa : 1 Orang
2. Sekretaris Desa : 1 Orang
3. Kepala Urusan : 3 Orang
4. Kepala Dusun : 6 Orang

Untuk lebih jelasnya struktur organisasi dan uraian tugas setiap unit kerja yang ada di desa Mahato Sakti dapat dilihat pada bagan sebagai berikut:



Gambar 4.1. Bagan Struktur Organisasi Desa Mahato Sakti



Sumber: Kantor Kepala Desa, Desa Mahato Sakti, 2011

Dari skema struktur organisasi pemerintahan desa diatas kepala desa merupakan orang pertama didesa yang memikul beban dan tanggung jawab terhadap desa an dibanu oleh perangkat desa lainnya agar roda pemerintahan berjalan dengan lancar.

## 2. Uraian Tugas

Untuk menegaskan tata pembagian dan hubungan kerja unit-unit organisasi pemerintah desa, maka dijelaskan kedudukan, tugas dan fungsi unit-unit kerja dalam struktur pemerintahan desa sebagai berikut:

### 1. Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kepala Desa

- a. Kepala desa berkeduduka sebagai alat pemerintahan eplaksanaan pemerintahan di Desa

- b. Kepala Desa mempunyai tugas pokok untuk menyelenggarakan urusan rumah tangganya sendiri, menjalankan urusan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan masyarakat menumbuhkan serta mengembangkan semangat gotong-royong sebagai sendi utama pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan desa.
  - c. Kepala Desa mempunyai fungsi untuk melaksanakan kegiatan dalam rangka menyelenggarakan urusan rumah tangganya, menggerakkan, partisipasi masyarakat dan melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pemerintah daerah dalam wilayah desanya.
2. Kedudukan , Tugas dan Fungsi Sekretaris Desa
- a. Sekretaris Desa berkedudukan sebagai unsur pembantu pimpinan dibidang ketata usahaan han pemimpin sekretaris desa.
  - b. Sekretaris Desa mempunyai tugas pokok untuk menyelenggarakan pelaksanaan administrasi pemerintahan, administrasi pembangunan dan administrasi kemasyarakatan.
  - c. Sekretaris Desa mempunyai fungsi untuk melaksanaka surat menyurat, kearsipan, laporan pelaksanaan keuangan dan urusan administrasi umum.
  - d. Melaksanakan tugas kepala desa, jika kepala desa berhalangan melaksanakan tugasnya.
3. Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kepala Urusan
- a. Kepala urusan berkedudukan sebagai unsur pembantu Sekretaris Desa untuk memberikan pelayanan ketata-usahaan kepada Kepala Desa sesuai dengan bidang dan tugasnya masing-masing.

- b. Kepala Urusan mempunyai tugas pokok untuk melaksanakan kegiatan ketata-usahaan dalam bidang tugasnya masing-masing.
  - c. Kepala Urusan mempunyai fungsi untuk melaksanakan pencatatan, pengumpulan dan pengolahan data/informasi yang menyangkut bidang dan tugasnya masing-masing.
4. Kedudukan, Tugas Pokok Kepala Dusun
- a. Kepala Dusun berkedudukan sebagai unsur pelaksanaan tugas Kepala Desa dalam wilayah kerjanya.
  - b. Kepala Dusun mempunyai tugas pokok untuk memperlancar jalanya pemerintahan desa.
  - c. Kepala Dusun diangkat dan diberhentikan oleh camat atas nama Bupati/ walikota madya kepala daerah tingkat II atas usul kepala Desa.

### **1.5 Sosial**

Di dalam masyarakat desa Mahato Sakti mempunyai bermacam-macam suku diantaranya:

1. Melayu
2. Jawa
3. Batak

Dari beberapa macam suku tersebut sudah digambarkan bahwa potensi desa tersebut memungkinkan untuk maju dan berkembangnya suatu desa. Semua suku yang ada di desa Mahato Sakti sangat memegang prinsip toleransi dan

gotong-royong sehingga kehidupan bermasyarakat di Desa Mahato Sakti sangat terjaga keharmonisanya.

## 1.6 Pendidikan

Pendidikan sebagai wahana untuk memekali manusia dengan pengetahuan sebagai modal dasar bagi pembangunan dan juga ikut mempengaruhi tingkat sosial dan ekonomi seseorang. Dalam usaha pemerintah dan masyarakat untuk meningkatkan sumber daya manusia dan pemerataan pembangunan yang dilaksanakan disegala bidang baik yang bersifat fisik maupun mental, maka sekolah umum, sekolah agama dan taman pendidikan Al-Quran di Desa Mahato Sakti tidak tertinggal dengan daerah daerah lain. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dari tabel berikut:

**Tabel IV.3.**  
**Sarana Pendidikan Di Desa Mahato Sakti**  
**Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu**

No	Jenis Sarana Pendidikan	Jumlah
1.	Taman Kanak-kanak	3 Buah
2.	Sekolah Dasar/ Madrasah Ibtidaiyah	8 Buah
3.	Madrasah Diniyah Awaliyah	5 Buah
4.	SMP / MTS	2 Buah
6.	SMA / MA	2 Buah

*Sumber: Kantor Kepala Desa Mahato Sakti 2011*

Melihat tabel diatas maka sarana pendidikan yang ada didesa mahato sakti cukup memadai dalam ukuran desa, untuk meningkatkan kecerdasan anak didik. Sehingga diharapkan generasi yang akan datang tidak ada yang buta huruf dan

juga diharapkan generasi yang akan datang dapat membangun daerahnya dengan menerapkan ilmu yang telah diperolehnya. Untuk lebih jelasnya bagaimana pendidikan masyarakat di Desa Mahato Sakti dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

**Tabel IV.4.**  
**Jumlah Penduduk Desa Mahato Sakti Kecamatan Tambusai Utara**  
**Kabupaten Rokan Hulu Menurut Tingkat Pendidikan.**

No	Tingkat Pendidikan	Frekuensi	Persentase
1.	Tidak Ada Tamatan	292 Orang	7,70%
2.	Belum Sekolah	745 Orang	19,65%
3.	Taman Kanak-kanak	191 Orang	5,03%
4.	Sekolah Dasar	1.293 Orang	34,11%
5.	SLTP	443 Orang	11,7%
6.	SLTA	654 Orang	17,26%
7.	Akademi	43 Orang	1,14%
8.	Sarjana	129 Orang	3,4%
Jumlah		3.790 Orang	100%

*Sumber: Kantor Kepala Desa Mahato Sakti 2011*

Dilihat pada tabel IV.4 diatas dapat dilihat bahwa tingkat pendidikan yang paling besar adalah tingkat sekolah dasar dengan jumlah 1.293 orang (34,11%), ini termasuk manula dan kepala keluarga serta ibu rumah tangga yang tidak dapat melanjutkan pendidikan pada masa kecilnya. Kemudian yang belum sekolah yaitu berjumlah 745 orang (19,65%) ini adalah balita dan anak-nak yang tidak sekolah TK. Selanjutnya tamat TK 191 orang (5,03%) ini adalah anak-anak yang baru tamat TK berusia 6 tahun. Selanjutnya yang tidak mempunyai tamatan sebanyak 292 orang (7,70%) ini adalah masyarakat yang tidak tamat sekolah

dasar dan mereka adalah orang sebagian kepala keluarga, ibu rumah tangga dan lanjut usia. Selanjutnya tamat SLTP sebanyak 443 orang (11,7%). Selanjutnya tamat SLTA sebanyak 654 orang (17,26%). Kemudian tamat akademi sebanyak 43 orang (1,14%) dan untuk lulusan perguruan tinggi yang mempunyai gelar sarjana sebanyak 129 orang (3,4%). Jadi bila dilihat masih banyak penduduk yang hanya menamatkan pendidikan sebatas Sekolah Dasar.

### **1.7 Kesehatan**

Untuk melayani masyarakat dibidang kesehatan, pemerintah telah mendirikan satu buah puskesmas yang dibuka setiap hari bagi masyarakat yang membutuhkan pelayanan kesehatan. Disamping itu tersedia juga pelayanan Rawat Inap bagi pasien yang mempunyai keluhan penyakit dan membutuhkan perawatan medis. Hal ini dikarenakan Desa Mahato Sakti Sangat jauh dari kota kabupaten. Sehingga masyarakat merasa sulit untuk menjangkau rumah sakit umum daerah. Dengan adanya puskesmas dan adanya pelayanan rawat inap, masyarakat merasa terbantu dalam melakukan pengobatan terhadap penyakit yang dideritanya. Bila dilihat dari jumlah tenaga medis dipuskesmas tersebut sudah sangat memadai untuk tingkat desa. Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel IV.5.**  
**Jumlah Tenaga Medis dan Pegawai di Puskesmas Desa Mahato Sakti**  
**Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu.**

No	Tenaga Medis/ administrasi	Jumlah
1.	Dokter Umum	2 Orang
2.	Bidan	4 Orang
3.	Perawat	3 Orang
4.	Admisitrasi	4 Orang

*Sumber: Kantor Kepala Desa Mahato Sakti 2011*

Bila dilihat dari keadaan tenaga medis dan pegawai puskesmas dapat disimpulkan bahwa kepedulian pemerintah terhadap kesehatan masyarakat sangat tinggi. Hal ini sangat mendorong percepatan pembangunan di Desa terebut. Karena masyarakat merasa diringankan dan dimudahkan dalam pelayanan kesehatan.

### **1.8 Agama**

Agama adalah masalah yang sangat penting dalam kehidupan dan tidak bisa dipisahkan dari diri seseorang. Masyarakat Mahato Sakti mayoritas beragama islam dan mereka taat dalam menjalankan ibadah. Ketaatan mereka dalam menjalankan ibadah, adanya sarana penunjang bagi masyarakat dalam menjalankan ajaran agamanya. Dari tabel berikut dapat dilihat jumlah sarana ibadah di Desa Mahato Sakti.

**Tabel IV.6.**  
**Sarana Ibadah di Desa Mahato Sakti**  
**Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu.**

No	Sarana Ibadah	Jumlah
1.	Masjid	8 Buah
2.	Mushalla	14 Buah
3.	Gereja	3 Buah

*Sumber: Kantor Kepala Desa Mahato Sakti 2011*

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa di Desa Mahato Sakti cukup sarana untuk melaksanakan ibadah. Keberadaan sarana ibadah ini selain digunakan sebagai tempat ibadah juga difungsikan sebagai tempat pendidikan serta dijadikan tempat untuk bermusyawarah yang menyangkut kegiatan keagamaan.



## BAB V

### PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

#### 5.1. Identitas Responden Penelitian.

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis dari angket yang disebar dan maupun wawancara langsung dapat diklasifikasikan mengenai keadaan responden yang menjadi narasumber dalam penelitian mengenai kepemimpinan Kepala Desa Dalam Pembangunan Desa Mahato Sakti Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu.

##### 1. Identitas Responden Menurut Tingkat Pendidikan.

Untuk melihat tingkat pendidikan yang diraih oleh responden dalam penelitian dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

**Tabel V.1.**  
**Identitas responden menurut tingkat pendidikan**

No	Jabatan Responden	Pendidikan				Jumlah	Persentase
		SD	SMP	SMA	S1		
1.	Kepala Desa	-	-	1	-	1	1,33%
2.	Sekretaris Desa	-	-	-	1	1	1,33%
3.	Aparat Pemb Desa	-	-	4	5	9	14,66%
4.	BPD	-	-	9	4	13	10,66%
5.	Masyarakat	25	35	30	7	97	71,99%
Jumlah		25	35	44	17	121	100%

*Sumber: Data Penelitian Lapangan 2011*

Dari tabel diatas terlihat tingkat pendidikan yang diraih oleh responden pada tingkat sekolah dasar adalah 25 orang. Sedangkan yang berpendidikan

sekolah menengah pertama atau sederajat berjumlah 35 orang . Responden yng berpendidikan sekolah menengah atas adalah 44 orang dan yang berpendidikan S1 yaitu 17 orang.

## 2. Identitas Responden Menurut Jenis Kelamin.

Adapun identitas responden menurut jenis kelamin dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel.V.2.**  
**Identitas responden menurut jenis kelamin**

No	Jenis Responden	Jenis Kelamin		Jumlah	Presentase
		Laki-laki	Perempuan		
1.	Kepala Desa	1		1	1,33%
2.	Sekretaris Desa	1		1	1,33%
3.	Aparat Pemb Desa	6	3	9	14,66%
4.	BPD	13	-	13	10,66%
5.	Masyarakat	53	44	97	71,99%
Jumlah		74	47	121	100%

Sumber: Data Lapangan Penelitian 2011

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui jenis kelamin responden penelitian ini untuk Kepala Desa 1 orang Laki-laki, Sekretaris Desa 1 orang Laki-laki, Aparatur Pemerintah Desa 9 orang laki dan 2 orang Perempuan, anggota BPD 8 orang Laki-laki dan masyarakat berjumlah 53 Laki-laki dan 44 orang Perempuan.

### 3. Identitas Responden Menurut Tingkat Umur.

Adapun usia reponden dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel V.3.**  
**Identitas responden menurut tingkat umur**

No	Umur	Frekuensi	Persentase
1.	19-25	39	32,23%
2.	26-32	35	28,9%
3.	33-39	24	19,8%
4.	40-46	15	12,3%
5.	47-53	8	6,61%
Jumlah		121	100%

Sumber: Data Lapangan Penelitian 2011

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa responden yang berumur 19-25 tahun berjumlah 39 orang (32,23%), sedangkan responden yang berumur 26-32 tahun berjumlah 35 orang (28,9%) , responden yang berumur 33-39 tahun berjumlah 24 orang (19,8%), responden yang berumur 40-46 tahun berjumlah 15 orang (12,3%), dan responden yang berumur 47-53 tahun berjumlah 8 orang (6,61 %).

## **1.2. Distribusi Jawaban Responden Terhadap Pertanyaan Fungsi Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Pembangunan Di Desa Mahato Sakti Kecamatan Tambusai Utara.**

Guna melihat bagaimana masing-masing indikator fungsi kepemimpinan kepala Desa dalam pembangunan desa yang dijalankan oleh kepala desa sebagai kepala pemerintahan di kantor desa di Desa Mahato sakti akan analisis beberapa indikator berikut ini:

1. Mengurus kegiatan rumah tangganya
2. Melaksanakan tugas pemerintahan
3. Menggerakkan Partisipasi Masyarakat
4. Menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat

### **1. Mengurus rumah tangganya.**

Keberhasilan pembangunan Desa tidak akan terlepas dari pelaksanaan dan fungsi kepemimpinan sosok kepala Desa yang baik. Kepala Desa mempunyai tanggung jawab yang besar dalam mensukseskan program pemerintah dan menampung aspirasi masyarakat yang bersifat membangun demi kelangsunagn dan kemajuan pembangunan desa yang ia pimpin. Kepemimpinan Kepala Desa saat ini sebenarnya sangat baik, namun demikian masyarakat masih belum merasakan dan melihat sifat kepemimpinan Kepala Desa yang baik tersebut. Masyarakat sangat mengharapkan kepada kepala Desa sebagai pemimpin dan pamong bagi masyarakat agar mampu menunjukkan kepada masyarakat sikap dan

perilaku yang baik pula. Untuk kepemimpinan kepala Desa dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel V.4.**  
**Distribusi jawaban responden tentang fungsi kepemimpinan kepala desa sebagai aparat pemerintah**

No	Keterangan	Frekuensi	Persentase %
1	Baik	53	43,8%
2	Cukup Baik	39	32,2%
3	Kurang Baik	29	24%
Jumlah		121	100%

*Sumber: Hasil Penelitian 2011*

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa jawaban responden terhadap fungsi kepemimpinan kepala desa sebagai aparat pemerintah 53 responden (43,8%) menjawab baik, kemudian 39 responden (32,2%) menjawab cukup baik, sedangkan 29 responden (24%) menjawab kurang baik.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut penulis dapat menyimpulkan bahwa fungsi kepemimpinan kepala desa sebagai aparat pemerintah masih cukup baik, namun demikian dalam kenyataan yang terdapat dilapangan masih terdapat beberapa kelemahan yang dilakukan oleh kepala desa sehingga menjadikan nama dan citra kepala desa dihadapan masyarakat kurang baik.

**Tabel V.5.**  
**Distribusi jawaban responden tentang fungsi kepemimpinan kepala desa  
 terhadap sistem birokrasi dan pelayanan publik**

No	Keterangan	Frekuensi	Persentase %
1	Baik	63	52%
2	Cukup Baik	21	17,4%
3	Kurang Baik	37	30,6%
Jumlah		121	100%

*Sumber: Hasil Penelitian 2011*

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa fungsi kepemimpinan kepala desa dalam menjalankan birokrasi dan pelayanan publik sudah baik. Hal ini berdasarkan jawaban responden terhadap pertanyaan seberapa besar tingkat pelaksanaan kepemimpinan demokrasi, 63 responden (52%) menjawab baik, kemudian 21 responden (17,4%) menjawab cukup baik, sedangkan 37 responden (30,6%) menjawab kurang baik.

Disamping itu menurut bapak Sudirman (responden wawancara)” kepemimpinan kepala desa sebenarnya sudah dalam melaksanakan pelayanan birokrasi sudah dilaksanakan dengan baik, namun demikian diharapkan kepada kepala desa agar dapat meningkatkan kualitas pelayanannya agar mempercepat pembangunan desa disegala bidang”.

**Tabel V.6.**  
**Distribusi jawaban responden tentang fungsi kepala desa**  
**dalam mengawasi pelayanan yang dilakukan oleh pegawai kantor desa**

No	Keterangan	Frekuensi	Persentase %
1	Baik	68	56,2%
2	Cukup Baik	33	27,3%
3	Kurang Baik	20	16,5%
Jumlah		121	100%

*Sumber: Hasil Penelitian 2011*

Berdasarkan tabel dan jawaban dari responden diatas dapat diketahui bahwa 68 responden (56,2%) meberikan jawaban baik terhadap pertanyaan bagaimana kepemimpinan kepala desa dalam mengawasi peayanan yang dilakukan pegawai kepada masyarakat, kemudian 33 responden (27,3%) memberikan jawaban cukup baik dan 20 responden (16,5%) memberikan jawaban kurang baik.

Berdasarkan hasil wawancara kepada salah seorang masyarakat bawhwa fungsi kepala desa dalam mengawasi pelayanan yang dilakukan oleh pegawai kepada masyarakat tergolong memuaskan. Menurut ibu Armida (responden wawancara) ” pemerintah desa saat ini dalam melaksanakan pelayanan kepada mayarakat sangat baik sekali hal ini dapat dilihat dari penyelesaian surat menyurat yang dibutuhkan masyarakat hanya membutuhkan waktu 1 hari”.

**Tabel V.7.**  
**Distribusi jawaban responden tentang kepemimpinan kepala desa**  
**dalam pengambilan keputusan.**

No	Keterangan	Frekuensi	Persentase %
1	Baik	58	47,9%
2	Cukup Baik	25	20,7%
3	Kurang Baik	38	31,4%
Jumlah		121	100%

*Sumber: Hasil Penelitian 2011*

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa kepemimpinan kepala desa dalam pengambilan keputusan masiih jauh dari yang diharapkan. Hal ini menurut ibu Karsina (wawancara responden)” kepala desa dalam pengambilan keputusan seringkali hampir tidak memperhatiakn masukan-masukan atau usul dari masyarakat sehingga dalam pengambilan keputusan tersebut sering bertentangan dengan keinginan masyarakat”. Kemudian disamping itu dapat diliha bahwa 58 responden (47,9%) meberikan jawaban baik terhadap pertanyaan bagaimana kepemimpinan kepala desa dalam pengambilan keputusan. Kemudian 25 responden (20,7%) memberikan jawaban cukup baik, dan 27 responden (31,4%) memberikan jawaban kurang baik.

Menurut salah seorang responden wawancara ( Bapak Muhammad Ali) ”bahwa kepemimpinan kepala desa saat ini dalam pengambilan keputusan kurang baik, hal ini dikarenakan kepala desa dalam mengambil keputusan tersebut tidak memperhatikan aspek maupun dampak negatif dan positif yang aka ditimbulkan setelah diambil keputusan tersebut. Sehingga dengan demikian kepala desa sering mengabaikan keinginan masyarakat”. Oleh karena itu masyarakat berharap agar



kepala desa dalam pengambilan keputusan harus memikirkan dampak yang akan ditimbulkan guna mempercepat pembangunan desa tersebut.

**Tabel V.8.**  
**Distribusi jawaban responden tentang fungsi kepemimpinan kepala desa dalam melaksanakan transparansi keuangan dan pembangunan.**

No	Keterangan	Frekuensi	Persentase %
1	Baik	43	35,5%
2	Cukup Baik	33	27,3%
3	Kurang Baik	45	37,2%
Jumlah		121	100%

*Sumber: Hasil Penelitian 2011*

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa tingkat kepemimpinan kepala desa dalam melaksanakan transparansi keuangan dan pembangunan masih kurang baik hal ini berdasarkan jawaban responden terhadap pertanyaan seberapa besar tingkat kepemimpinan kepala desa dalam melaksanakan transparansi keuangan, 43 responden (35,5%) menjawab baik, kemudian 33 responden (27,3%) menjawab cukup baik, dan 45 responden (37,2%) memberikan jawaban kurang baik.

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa kepala desa dalam melakukan transparansi keuangan dan pembangunan masih kurang baik, hal ini berdasarkan program program yang terhenti pembangunannya padahal dan yang dikumpulkan telah mencukupi untuk menyelesaikan program tersebut. Maka untuk kedepanya masyarakat berharap kepada kepala desa agar mampu melakukan transparansi terhadap program yang terhambat pembangunannya dengan menjelaskan permasalahan yang dihadapi kepada masyarakat.

**Tabel V.9.**  
**Distribusi jawaban responden tentang fungsi kepemimpinan kepala desa**  
**dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.**

No	Keterangan	Frekuensi	Persentase %
1	Baik	56	46,3%
2	Cukup Baik	38	31,4%
3	Kurang Baik	27	22,3%
Jumlah		121	100%

*Sumber: Hasil Penelitian 2011*

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa tingkat kepemimpinan kepala desa dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat sudah tergolong tinggi. Hal ini berdasarkan jawaban responden yang memberikan jawaban terhadap pertanyaan bagaimana kepemimpinan kepala desa dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yaitu 56 responden (46,3%) menjawab baik, kemudian 38 responden (31,4%) menjawab cukup baik, sedangkan 22 responden (22,3%) kurang baik.

Kepala desa mempunyai kewajiban memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan memberikan yang terbaik. Berdasarkan hasil penelitian lapangan masih ditemukan kelemahan-kelemahan yang harus diatasi mengenai pelayanan kepada masyarakat yaitu masih kurangnya sosialisasi kepada masyarakat tentang bagaimana cara mendapatkan pelayanan yang prima dan cepat.

**Tabel V.10.**  
**Distribusi jawaban responden tentang kepemimpinan kepala desa**  
**terhadap pelaksanaan kebijakan.**

No	Keterangan	Frekuensi	Persentase %
1	Baik	40	33%
2	Cukup Baik	59	48,8%
3	Kurang Baik	22	18,2%
Jumlah		121	100%

*Sumber: Hasil Penelitian 2011*

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa kepemimpinan kepala desa dalam pelaksanaan kebijakan cukup baik. Hal ini berdasarkan jawaban responden terhadap pertanyaan tingkat kepemimpinan kepala desa terhadap pelaksanaan kebijakan, yaitu 40 responden (33,6%) menjawab baik, kemudian 59 responden (48,8%) memberikan jawaban cukup baik, sedangkan 22 responden (18,2%) menjawab kurang baik.

Dalam melaksanakan kebijakan yang telah dibuat kepala desa mempunyai tanggung jawab sepenuhnya untuk menyelesaikan semua program yang telah direncanakan. Namun demikian dalam melaksanakan program ataupun kebijakan tersebut kepala desa harus mengajak lapisan masyarakat untuk berpartisipasi mensukseskannya. Karena berdasarkan survey lapangan masih banyak kebijakan-kebijakan yang telah dibuat tidak dapat dilaksanakan dikarenakan tidak mendapatkan dukungan dari masyarakat.

**Tabel V.11.**  
**Distribusi jawaban responden tentang kepala desa**  
**dalam menjalankan program pemerintah daerah kabupaten .**

No	Keterangan	Frekuensi	Persentase %
1	Baik	36	29,8%
2	Cukup Baik	58	47,9%
3	Kurang Baik	27	22,3%
Jumlah		121	100%

*Sumber: Hasil Penelitian 2011*

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa tingkat pelaksanaan program pemerintah daerah cukup baik. Hal ini berdasarkan jawaban responden yang memberikan jawaban terhadap pertanyaan bagaimana kepala desa dalam menjalankan program pemerintah daerah, 36 responden (29,8%) menjawab baik, kemudian 58 responden (47,9%) menjawab cukup baik, sedangkan 27 responden (22,3%) memberikan jawaban kurang baik.

Berdasarkan survey yang penulis lakukan masih banyak ditemui program pemerintah daerah kabupaten yang tidak terealisasi sepenuhnya. Hal ini menunjukkan bahwa kepala desa dalam menjalankan tugas dari pemerintah kabupaten kurang memiliki rasa tanggung jawab. Oleh karena itu diharapkan untuk kedepannya kepala desa agar mampu menjalankan tugas sepenuhnya dengan rasa tanggung jawab.

## **2. Melaksanakan tugas dari pemerintah diatasnya**

Sebagai kepala pemerintahan desa kepala desa mempunyai kewajiban mengikuti dan melaksanakan perintah dari pemerintahan diatasnya agar

mempercepat pembangunan desa disegala bidang. Oleh karena itu dalam menjalankan perintah dari pemerintahan diatasnya maka kepala desa harus berusaha sekuat tenaga dan kemampuan agar tidak menyimpang dalam melaksanakan tugasnya. Dalam melaksanakan tugas dari pemerintah diatasnya tentunya masih terdapat kekurangan –kekurangan dan masih perlu dilakukan peningkatan. Untuk mengetahui pelaksanaan indikator melaksanakan tugas dari pemerintahan diatasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel V.12.**  
**Distribusi jawaban responden tentang upaya kepala desa**  
**dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.**

No	Keterangan	Frekuensi	Persentase %
1	Baik	48	39,7%
2	Cukup Baik	38	31,4%
3	Kurang Baik	35	28,9%
Jumlah		121	100%

*Sumber: Hasil Penelitian 2011*

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa bagaimana upaya kepala desa dalam meningkatkan pelayanan tergolong baik hal ini berdasarkan jawaban responden terhadap pertanyaan bagaimana upaya kepala desa daam meningkatkan pelayanann kepada masyarakat yaitu 48 responden (39,7%) menjawab baik, kemudian 38 responden (31,4%) menjawab cukup baik, 35 responden (28,9%) menjawab kurang baik.

Kepala desa dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sangat penting sekali, hal ini karena pelayanan adalah kebutuhan masyarakat yang harus dipenuhi oleh pemerintah desa. Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu

responden ( bapak Agus Hidayat) bahwa” kepala desa dalam melaksanakan peningkatan pelayanan kepada masyarakat masih kurang baik, hal ini dikarenakan tidak adanya transparansi keuangan yang dilakukan pemerintah desa kepada masyarakat sebelum pelaksanaan pengurusan ataupun pelayanan publik. Namun transparansi tersebut dilakukan setelah pelayanan dilakukan sehingga masyarakat merasa keewa terhadap pelayanan tersebut”

**Tabel V.13.**  
**Distribusi jawaban responden tentang kepemimpinan kepala desa terhadap pelaksanaan pemberian jamkesmas kepada masyarakat .**

No	Keterangan	Frekuensi	Persentase %
1	Baik	39	32,2%
2	Cukup Baik	57	47,1%
3	Kurang Baik	25	20,7%
Jumlah		121	100%

*Sumber: Hasil Penelitian 2011*

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa kepemimpinan kepala desa terhadap pemberian jamkesmas masih cukup baik hal ini berdasarkan jawaban responden terhadap peratnyaan bagaimana kepemimpinan kepala desa terhadap pemberian jamkesmas kepa masyarakat yaitu, 39 responden (32,2%) menjawab baik, kemudian 57 responden (47,1%) menjawab cukup baik, sedangkan 25 responden (20,7%) menjawab kurang baik.

Berdasarkan hasil penelitian penulis masi menemukan ketimpangan terhadap pemberian jamkesmas kepada masyarakat. Hal ini dikarenakan masyarakat yang seharusnya mendapatkan jamkesmas ketika akan melaksanakan perobatan dikenakan biaya oleh pemerintah desa dalam pengurusan jamkesmas

tersebut. Menurut bapak Ratino (responden wawancara) ” kepala desa saat ini sering melakukan pungutan terhadap masyarakat yang akan melakukan pengurusan jamkesmas, padahal masyarakat yang meminta jamkesmas mayoritas tergolong kurang mampu. Sehingga diharapkan kedepannya kepala desa agar dapat menghilangkan pungutan tersebut karena akan membebani masyarakat.

**Tabel V.14.**  
**Distribusi jawaban responden tentang kepemimpinan kepala desa dalam merealisasikan program K2I.**

No	Keterangan	Frekuensi	Persentase %
1	Baik	51	42,1%
2	Cukup Baik	49	40,5%
3	Kurang Baik	21	17,4%
Jumlah		121	100%

*Sumber: Hasil Penelitian 2011*

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa kepemimpinan kepala desa dalam merealisasikan program K2I tergolong baik. Hal ini berdasarkan jawaban responden terhadap peratnyaan bagaimana kepemimpinan kepala desa dalam merealisasikan program K2I. Adapun 51 responden (42,1%) menjawab baik, kemudian 49 responden (40,5%) menjawab cukup baik, sedangkan 21 responden (17,4%) menjawab kurang baik.

Berdasarkan kenyataan dilapangan pemerintah desa dalam menjalankan program K2I memang sudah tergolong baik, namun demikian prestasi tersebut harus dapat ditingkatkan untuk kesejahteraan masyarakat desa tersebut.

**Tabel V.15.**  
**Distribusi jawaban responden tentang kepemimpinan kepala desa terhadap pelaksanaan pungutan pajak bumi dan bangunan di desa**

No	Keterangan	Frekuensi	Persentase %
1	Baik	38	31,4%
2	Cukup Baik	56	46,3%
3	Kurang Baik	27	22,3%
Jumlah		121	100%

*Sumber: Hasil Penelitian 2011*

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa jawaban responden terhadap kepemimpinan kepala desa terhadap pungutan paja bumi dan bangunan masih cukup baik. Adapaun jawaban dari responden yaitu 38 responden (31,4%) menjawab baik, kemudian 56 responden (46,3%) mejawab cukup baik, sedangkan 27 responden (22,3%) menjawab kurang baik.

Berdasarkan tabel diatas kepala desa dalam melaksanakn pungutan pajak kepada masyarak sudah tergolong baik, namun masih perlu ditigkatkan dengan cara mengajak kepada masyarakat seluruhnya agar mau membayar pajak bumi dan bangunan demi mempercepat pembangunan desa dimasa akan datang.

**Tabel V.16.**  
**Distribusi jawaban responden tentang fungsi kepala desa dalam melaksnakan program konfersi minyak tanah ke gas.**

No	Keterangan	Frekuensi	Persentase %
1	Baik	39	32,2%
2	Cukup Baik	49	40,5%
3	Kurang Baik	33	27,3%
Jumlah		121	100%

*Sumber: Hasil Penelitian 2011*



Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa jawaban responden terhadap pertanyaan kemampuan kepala desa dalam melaksanakan program konfersi minyak tanah ke gas yaitu, 39 responden (32,2%) menjawab baik, kemudian 49 responden (40,5%) menjawab cukup baik, sedangkan 33 responden (27,3%) menjawab kurang baik.

Kemampuan kepala desa dalam melaksanakan program konfersi minyak tanah ke gas tergolong cukup baik, namun menurut responden hasil wawancara (Ibu Ratna) ”kepala desa dalam menyalurkan konfersi minyak tanah ke gas tergolong lambat padahal gas tersebut telah berada dikantor desa namun tidak secepatnya dibagikan kepada masyarakat, melainkan menunggu hingga satu bulan. Padahal minyak tanah pada saat itu sudah sangat langka dan mahal. Sehingga masyarakat merasa kecewa terhadap kepala desa.

**Tabel V.17.**

**Distribusi jawaban responden tentang fungsi kepala desa dalam melaksanakan tugas pembangunan yang berasal dari pemerintah daerah**

No	Keterangan	Frekuensi	Persentase %
1	Baik	37	30,6%
2	Cukup Baik	59	48,8%
3	Kurang Baik	25	20,6%
Jumlah		121	100%

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa fungsi kepala desa dalam melaksanakan tugas pembangunan cukup baik, hal ini dapat diketahui dari jawaban responden yang memberikan jawabannya terhadap pertanyaan seberapa besar keberhasilan kepala desa dalam melaksanakan kebijakan diantaranya 37

responden (30,6%) menjawab baik, kemudian 59 responden (48,8%) menjawab cukup baik, sedangkan 25 responden (20,6%) menjawab kurang baik.

Fungsi kepala desa dalam melaksanakan pembangunan masih perlu ditingkatkan. Berdasarkan hasil survey terlihat bahwa kepala desa dalam melaksanakan pembangunan masih kurang baik. Hal ini berdasarkan latar belakang masalah yang telah penulis uraikan terlihat dengan jelas bahwa kepala desa kurang serius dalam melaksanakan pembangunan.

### 3. Menggerakkan partisipasi masyarakat

Dalam mencapai keberhasilan pembangunan yang sesuai dengan yang diharapkan, pemerintah desa mempunyai berbagai macam upaya dan cara untuk mewujudkan keberhasilan tersebut. Cara-cara yang dilakukan kepala desa adalah bagian dari percepatan pembangunan desa disegala bidang dengan melibatkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam menjalankan pembangunan tersebut. Untuk mengetahui partisipasi masyarakat desa mahato sakti dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel V.18.**  
**Distribusi jawaban responden tentang keterlibatan masyarakat**  
**dalam proses pembangunan desa.**

No	Keterangan	Frekuensi	Persentase %
1	Baik	51	42,1%
2	Cukup Baik	42	34,7%
3	Kurang Baik	28	23,1%
Jumlah		121	100%

*Sumber: Hasil Penelitian 2011*

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa keterlibatan masyarakat dalam melakukan pembangunan desa sangat besar, hal ini berdasarkan hasil jawaban responden yang memberikan jawabannya yaitu 51 responden (42,1%) menjawab baik, kemudian 42 responden (34,7%) menjawab cukup baik, sedangkan yang menjawab kurang baik hanya 28 responden (23,1%).

Masyarakat tidak bisa ditinggalkan dan harus dilibatkan dalam proses pemabngunan desa. Karena masyarakat adalah ujung tombak keberhasilan pemabngunan yang akan dilaksanakan. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa keterlibatan masyarakat masyarakat dalam pemabngunan masih kurang baik. Sehingga banayak maysarakat yang kurang peduli terhadap pembanguna yang dilakukan oleh pemerintah desa. Disamping itu masyarakat banyak yang tidak merasa memiliki bangunan infrastruktur yang telah dibangun sehingga banayak masyarakat yang merusak dan menelantarkan bangunan yang telah dibangun dengan menggunakan biaya yang cukup banyak.

**Tabel V.19.**  
**Distribusi jawaban responden tentang kepedulian masyarakat terhadap pembangunan pendidikan dan mental.**

No	Keterangan	Frekuensi	Persentase %
1	Baik	40	33,1%
2	Cukup Baik	57	47,1%
3	Kurang Baik	24	19,8%
Jumlah		121	100%

*Sumber: Hasil Penelitian 2011*

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa kepedulian masyarakat terhadap pembangunan mental sangat tinggi. Hal ini menjadi dasar bagi

pemerintah dalam melaksanakan pembangunan mental yang kuat bagi masyarakat. Dalam pertanyaan tentang seberapa besar kepedulian masyarakat dalam pembangunan mental 40 responden (33,1%) menjawab baik, kemudian 57 responden (47,1%) menjawab cukup baik, sedangkan untuk 24 responden (19,8%) menjawab kurang baik.

Dalam pembangunan mental masyarakat desa Mahato Sakti tergolong sangat tinggi partisipasinya. Sehingga setiap kegiatan keagamaan dan program pembangunan mental yang dilakukan pemerintah selalu mendapatkan dukungan sepenuhnya dari masyarakat.

**Tabel V.20.**  
**Distribusi jawaban responden tentang partisipasi masyarakat dalam kegiatan sosial.**

No	Keterangan	Frekuensi	Persentase %
1	Baik	61	50,4%
2	Cukup Baik	42	34,7%
3	Kurang Baik	18	14,9%
Jumlah		121	100%

*Sumber: Hasil Penelitian 2011*

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa tingkat partisipasi masyarakat dalam melaksanakan kegiatan sosial sangat baik, hal ini dapat dilihat bahwa 61 responden (50,4%) menjawab baik, kemudian 42 responden (34,7%) menjawab cukup baik, sedangkan untuk 18 responden (14,9%) menjawab kurang baik.

Dalam kegiatan sosial partisipasi masyarakat sangat tinggi karena mereka merasa satu keluarga dalam hal kegiatan sosial. Sehingga setiap kegiatan sosial

masyarakat sangat antusias mendukung dan ikut melaksanakan kegiatan tersebut. Menurut bapak Ucok (responden wawancara) bahwa partisipasi masyarakat dalam kegiatan sosial perlu dipertahankan dan perlu ditingkatkan sehingga pembangunan akan cepat dilaksanakan apabila mengalami hambatan-hambatan.

**Tabel V.21.**  
**Distribusi jawaban responden tentang partisipasi masyarakat dalam bentuk ide dan pemikiran.**

No	Keterangan	Frekuensi	Persentase %
1	Baik	48	39,6%
2	Cukup Baik	52	43%
3	Kurang Baik	21	17,4%
Jumlah		121	100%

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa partisipasi masyarakat dalam bentuk pemikiran tergolong cukup baik sehingga menjadikan daerah tersebut cepat maju dan berkembang hal ini dapat diketahui berdasarkan jawaban responden mengenai hal tersebut. Adapun jawaban responden terhadap pertanyaan partisipasi masyarakat dalam bentuk ide dan pemikiran yaitu 48 responden (39,6%) menjawab baik, kemudian 52 responden (43%) menjawab cukup baik, sedangkan 21 responden (17,4%) menjawab kurang baik.

Berdasarkan survey penulis masih menemukan kekurangan-kekurangan masyarakat dalam memberikan ide dan pemikiran. Hal ini disebabkan kepedulian kepala desa terhadap ide-ide yang disampaikan oleh masyarakat. Sehingga masyarakat merasa tidak perlu memberikan ide dan pemikiran terhadap proses pembangunan desa tersebut. Untuk kedepannya diharapkan kepada kepala desa agar

mampu menampung aspirasi masyarakat yang bersifat membangun guna mempercepat pertumbuhan pembangunan.

**Tabel V.22.**  
**Distribusi jawaban responden tentang partisipasi masyarakat terhadap pembangunan dalam bentuk materi.**

No	Keterangan	Frekuensi	Persentase %
1	Baik	48	39,6%
2	Cukup Baik	59	48,8%
3	Kurang Baik	14	11,6%
Jumlah		121	100%

*Sumber: Hasil Penelitian 2011*

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa tingkat partisipasi masyarakat terhadap pembangunan dalam bentuk materi cukup baik hal ini dapat diketahui dari jawaban responden yaitu 48 responden (39,6%) menjawab baik, kemudian 59 responden (48,8%) menjawab cukup baik, sedangkan 14 responden (11,6%) menjawab kurang baik.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukan bahwa partisipasi masyarakat dalam bentuk materi cukup tinggi hal ini terlihat pada latar belakang masalah yang telah diuraikan bahwa masyarakat dalam memberikan materi untuk mensukseskan pembangunan yang telah direncanakan oleh pemerintah desa. Namun demikian masyarakat merasa kecewa terhadap kepala desa yang kurang amanah dalam menggunakan dana masyarakat yang telah dikumpulkan. Sehingga banyak kegiatan yang tidak selesai padahal dana tersebut telah tersedia baik dari masyarakat maupun dari pemerintah daerah kabupaten.

**Tabel V.23.**  
**Distribusi jawaban responden tentang partisipasi masyarakat**  
**dalam pembangunan spiritual**

No	Keterangan	Frekuensi	Persentase %
1	Baik	29	24%
2	Cukup Baik	65	53,7%
3	Kurang Baik	27	22,3%
Jumlah		121	100%

*Sumber: Hasil Penelitian 2011*

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa partisipasi masyarakat dalam pembangunan spiritual cukup baik, hal ini dapat kita ketahui melalui jawaban responden yaitu 29 responden (24,%) menjawab baik, kemudian 65 responden (53,7%) menjawab cukup baik sedangkan 27 responden ( 22,3%) menjawab kurang baik.

Kegiatan spiritual dan keagamaan didesa tersebut tergolong baik sekali hal ini terlihat dari setiap kegiatan keagamaan selalu dihadiri lebih 50% dari jumlah masyarakat desa. Sehingga dengan demikian kegiatan-kegiatan keagamaan dapat menjadi ajang silaturahmi antar warga. Disamping itu setiap waktu shalat hampir disetiap masjid dikumandangkan azan walaupun tidak menggunakan pengeras suara. Dan kenyataanya masyarakat yang serin shalat berjamaah dimasjid setiap lima waktu lumayan banyak.

**Tabel V.24.**  
**Distribusi jawaban responden tentang partisipasi masyarakat**  
**dalam gotong- royong dalam pembangunan desa.**

No	Keterangan	Frekuensi	Persentase %
1	Baik	67	55,3%
2	Cukup Baik	33	27,3%
3	Kurang Baik	21	17,4%
Jumlah		121	100%

*Sumber: Hasil Penelitian 2011*

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa partisipasi masyarakat dalam gotong royong dalam pembangunan desa sangat tinggi hal ini dapat kita ketahui melalui jawaban responden yaitu 67 responden (55,3%) menjawab baik, kemudian 33 responden (27,3%) menjawab cukup baik, sedangkan 21 responden (17,4%) menjawab kurang baik.

Gotong royong adalah simbol kemajuan masyarakat desa terhadap kepedulian pemabngunan. Pada saat sekarang ini partisipasi masyarakat dalam mengikuti gotong royng perlu ditingkatkan, sehingga setiap kegiatan dapat cepat dan tepat diselesaikan sesuai yang diinginkan.

**Tabel V.25.**  
**Distribusi jawaban responden tentang peranan masyarakat**  
**dalam pembangunan desa.**

No	Keterangan	Frekuensi	Persentase %
1	Baik	38	31,4%
2	Cukup Baik	58	47,9%
3	Kurang Baik	25	20,7%
Jumlah		121	100%

*Sumber: Hasil Penelitian 2011*



Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa peranan masyarakat dalam melaksanakan pembangunan sangat tinggi walaupun demikian tetapi masih terdapat juga peran masyarakat dalam pembangunan masih kurang hal ini terlihat dari jawaban responden terhadap pertanyaan peranan masyarakat dalam melaksanakan pembangunan desa yaitu 38 responden (31,4%) menjawab baik, 58 responden (47,9%) menjawab cukup baik, sedangkan 25 responden (20,7%) menjawab kurang baik.

Dalam pembangunan masyarakat diharapkan dapat berperan serta dalam mensukseskan pembangunan disegala bidang sehingga kemajuan pembangunan akan dapat dicapai. Namun demikian peranan masyarakat di desa tersebut masih kurang karena kepala desa dalam merangkul elemen masyarakat hanya untuk program yang bersifat sosial. Padahal seharusnya kepala desa harus mampu merangkul masyarakat dalam kegiatan seluruhnya yang berkaitan dengan pembangunan.

**Tabel V.26.**  
**Distribusi jawaban responden tentang partisipasi masyarakat dalam menjaga budaya masyarakat.**

No	Keterangan	Frekuensi	Persentase %
1.	Baik	41	33,9%
2.	Cukup Baik	52	43%
3.	Kurang Baik	28	23,1%
Jumlah		121	100%

*Sumber: Hasil Penelitian 2011*

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa jawaban atas pertanyaan partisipasi masyarakat dalam menjaga budaya masyarakat tergolong cukup baik

hal ini berdasarakan jawaban dari responden yang menjawab quisioner yang diberikan kepada para responden yaitu 41 responden (33,9%) menjawab baik, 52 responden (43%) menjawab cukup baik, sedangkan 28 responden (23,1%) menjawab kurang baik.

Dalam menjaga budaya dan adat istiadat yang tedapat di desa mahato sakti kecamatan tambusai utara masyarakat cukup baik, namun demikian perlu ditingkatkan agar budaya yag baik yang telah ada tidak hilang ditelan zaman. Dengan adanya budaya kebaikan yang masih bertahan akan mampu menyatukan komponen masyarakat desa tersebut.

#### **4. Menjaga keamanan dan ketertiban Masyarakat**

Keamanan adalah sebuah kebutuhan pada masing masing individu yang paling mendasar. Oleh karena itu, dalam menjaga keamanan diharapkan kepada kepala desa agar mampu menjaga keamanan bersama-sama dengan masyarakat. Agar kehidupan yang harmonis dapat tercipta dikalangan masyarakat itu sendiri. Sesuai Peraturan Pemerintah No 72 tahun 2005 pemerintah desa mempunyai fungsi menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Untuk melihat fungsi kepala desa dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel V.27.**  
**Distribusi jawaban responden tentang keberhasilan kepala desa**  
**menggalakan ronda malam.**

No	Keterangan	Frekuensi	Persentase %
1	Baik	58	47,9%
2	Cukup Baik	37	30,6%
3	Kurang Baik	26	21,5%
Jumlah		121	100%

*Sumber: Hasil Penelitian 2011*

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa jawaban responden terhadap pertanyaan keberhasilan kepala desa dalam menggalakkkan ronda malam sudah tergolong baik, hal ini berdasarkan jawaban responden yaitu 58 responden (47,9%) menjawab baik, 37 responden (30.6%) menjawab cukup baik, sedangkan 26 responden (21,5%) menjawab kurang baik.

Dalam pelaksanaan ronda malam kepala desa kurang mensosialisaikan terlebih dahulu kepada masyarakat sehingga masyarakat ada yang tidak mengetahui kegiatan tersebut. Oleh karena itu untuk kedepanya kepal desa harus mensosialisasikan terlebih dahulu kepada masyarakat agar kegiatan tersebut dapat dilaksanakan oleh masyarakat demi menjaga keamanan desa tersebut.

**Tabel V.28.**  
**Distribusi jawaban responden tentang fungsi kepala desa**  
**dalam memelihara kerukunan antar umat beragama.**

No	Keterangan	Frekuensi	Persentase %
1	Baik	52	43%
2	Cukup Baik	42	34,7%
3	Kurang Baik	27	22,3%
Jumlah		121	100%

*Sumber: Hasil Penelitian 2011*

Berdasarkan tabel diatas hasil dapat diketahui bahwa jawaban responden terhadap pertanyaan fungsi kepala desa dalam memelihara kerukunan antar umat beragama masih tergolong baik hal ini menurut bapak kusiman ( responden wawancara) menyatakan bahwa” kerukunan antar umat beragama didesa tersebut perlu dipelihara dan ditingkatkan, hal ini dikarenakan masih banyaknya kesalah pahaman terhadap agama-agama didesa tersebut”. Hal ini juga dapat dilihat dari jawaban responden yang memberikan jawabanya yaitu, 52 responden (43%) menjawab baik, kemudian 42 responden (34,7%) memberikan jawaban cukup baik, sedangkan 27 responden (22,3%) memberikan jawaban kurang baik.

**Tabel V.29.**  
**Distribusi jawaban responden tentang fungsi kepala desa**  
**dalam menyatukan pendapat antar suku yang ada.**

No	Keterangan	Frekuensi	Persentase %
1	Baik	37	30,6%
2	Cukup Baik	39	32,2%
3	Kurang Baik	45	37,2%
Jumlah		121	100%

*Sumber: Hasil Penelitian 2011*

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa keberhasilan kepala desa dalam menyatukan antar suku yang ada masih kurang baik. berdasar hasil jawaban dari responden yang memberikan jawaban pada quisiனர் yang disebarkan yaitu: 37 responden (30,6%) menjawab baik, kemudian 39 responden (32,2%) meberikan jawaban cukup baik, sedangkan 45 responden (37,2%) memberikan jawaban kurang baik.

Dalam menyatukan pendapat antar suku kepala desa tergolong kurang abik, karena kepala desa sering mengutamakan kepentingan sukunya sendiri sehingga terjadi ketimpangan dimasyarakat terhadap pendapat-pendapat dari beberapa suku yang ada. Oleh karena itu diharapkan kepala desa agar mampu mengutamakan kepentingan umum bukan kepentingan satu suku yang ada di desa tersebut.

**Tabel V.30.**  
**Distribusi jawaban responden tentang fungsi kepala desa dalam memberantas pekat di desa mahato sakti.**

No	Keterangan	Frekuensi	Persentase %
1	Baik	47	38,8%
2	Cukup Baik	52	43%
3	Kurang Baik	22	18,2%
Jumlah		121	100%

*Sumber: Hasil Penelitian 2011*

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa fungsi kepala desa dalam memberantas penyakit masyarakat tergolong baik hal ini dibuktikan dengan jawaban dari responden yaitu 47 responden (38,8%) memberikan jawaban baik, kemudian 52 responden (43%) memberikan jawaban cukup baik, sedangkan 22 responden (18%) memberikan jawaban kurang baik.

Penyakit masyarakat adalah kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh orang-orang yang kurang menghargai hak-hak orang lain. Sehingga dengan adanya kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh orang-orang tersebut sangat mengganggu ketentraman kehidupan masyarakat. Kepala desa mempunyai tugas berat dalam memberantas pekat yang ada di desa tersebut guna meningkatkan keamanan dan ketertiban kehidupan masyarakat.

**Tabel V.31.**  
**Distribusi jawaban responden tentang fungsi kepala desa**  
**dalam memelihara kenyamanan dan keharmonisan masyarakat.**

No	Keterangan	Frekuensi	Persentase %
1	Baik	49	40,5%
2	Cukup Baik	55	45,5%
3	Kurang Baik	17	14%
Jumlah		121	100%

*Sumber: Hasil Penelitian 2011*

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa keberhasilan kepala desa dalam memelihara kenyamanan dan keharmonisan masyarakat tergolong tinggi dan memuaskan hal ini dapat diketahui berdasarkan jawaban responden yang memberikan jawaban terhadap pertanyaan tentang keberhasilan kepala desa membangun partisipasi masyarakat, diantaranya 49 responden (40,5%) menjawab baik, kemudian 55 responden (45,5%) memberikan jawaban cukup baik, sedangkan 17 responden (14%) menjawab kurang baik.

Fungsi kepala desa dalam menjaga keharmonisan masyarakat sangat penting sekali, hal ini dikarenakan setiap kegiatan yang akan dilakukan harus mendapat persetujuan kepala desa guna menjaga keharmonisan bermasyarakat. Dengan demikian kepala desa diharapkan arif dan bijaksana dalam menyikapi persoalan yang dihadapi masyarakat guna menjaga keharmonisan dan kerukunan kehidupan bermasyarakat.

**Tabel V.32. Distribusi jawaban responden tentang fungsi kepala desa dalam memelihara budaya masyarakat.**

No	Keterangan	Frekuensi	Persentase %
1	Baik	53	43,8%
2	Cukup Baik	37	30,6%
3	Kurang Baik	31	25,6%
Jumlah		121	100%

*Sumber: Hasil Penelitian 2011*

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa keberhasilan kepala desa dalam memelihara budaya masyarakat cukup tinggi, hal ini dibuktikan dengan jawaban responden terhadap pertanyaan yang berkaitan tentang keberhasilan kepala desa dalam merumuskan program kerja diantaranya 53 responden (43,8%) memberikan jawaban baik, kemudian 37 responden (30,6%) menjawab cukup baik, sedangkan 31 (25,6%) memberikan jawaban kurang baik.

Dalam menjaga budaya dan adat di masyarakat kepala desa mendapatkan dukungan yang cukup baik dari masyarakat, sehingga kepala desa dalam hal ini tergolong berhasil. Namun demikian kepala desa harus mampu memperathankan bahkan harus meningkatkan rasa tanggung jawab dalam menjaga budaya masyarakat.

**Tabel V.33.  
Distribusi jawaban responden tentang keberhasilan kepala desa dalam memelihara persatuan da kesatuan.**

No	Keterangan	Frekuensi	Persentase %
1	Baik	42	34,7%
2	Cukup Baik	57	47,1%
3	Kurang Baik	22	18,2%
Jumlah		121	100%

*Sumber: Hasil Penelitian 2011*

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa keberhasilan kepala desa dalam menggali potensi masyarakat menurut responden yaitu cukup baik. Hal ini dapat diketahui bahwa 42 responden (34,9%) menjawab baik, kemudian 57 responden (47,1) menjawab cukup baik, sedangkan 22 responden (18,2%) menjawab kurang baik.

Dalam menggali potensi yang dimiliki oleh masyarakat kepala desa masih perlu meningkatkan kualitas agar potensi yang dimiliki oleh masyarakat tidak tersia-siakan. Kepala desa harus mengajak masyarakat luas untuk bersama-sama menggali potensi-potensi yang dimiliki masyarakat dan mendidik serta meningkatkan potensi tersebut agar mempercepat pembangunan desa tersebut.

### **5.3. Analisa Indikator Variabel penelitian**

Adapun variabel penelitian dan indikator penelitian nya sebagai berikut:

#### **1. Mengurus kegiatan rumah tangganya**

Adapun yang menjadi indikator pada variabel ini terlihat pada tabel 5.34 berikut:



**Tabel V.34.**  
**Indikator mengurus kegiatan dalam rumah tangganya**

No	Indikator Variabel	B	CB	KB	Persentase
1	Fungsi kepemimpinan kepala desa sebagai aparat pemerintah	53 (53%)	39 (32%)	29 (24%)	121 (100%)
2	Fungsi kepemimpinan kepala desa terhadap birokrasi desa	63 (52%)	21 (17%)	37 (31%)	121 (100%)
3	Fungsi kepala desa dalam mengawasi pelayanan yang dilakukan pegawai	68 (56%)	33 (27%)	20 (17%)	121 (100%)
4	Fungsi kepemimpinan kepala desa dalam pengambilan keputusan	58 (48%)	25 (21%)	38 (31%)	121 (100%)
5	Fungsi kepemimpinan kepala desa dalam melaksanakan transparansi keuangan	43 (35%)	33 (27%)	45 (37%)	121 (100%)
6	Fungsi kepemimpinan kepala desa terhadap pelayanan kepada masyarakat	56 (46%)	38 (31%)	27 (22%)	121 (100%)
7	Kepemimpinan kepala desa terhadap pelaksanaan kebijakan	40 (33%)	59 (48%)	23 (18%)	121 (100%)
Jumlah		381	245	219	845 (100%)
Persentase		45%	29%	26%	100%

*Sumber: Data Olahan Tahun 2011*

Pada tabel diatas terlihat dengan jelas indikator-indikator variabel ini sangat berpariatif, dimana fungsi kepala desa sebagai aparat pemerintah rata-rata 53 responden dari 121 sampel menyatakan baik, 39 responden yang menyatakan cukup baik, 29 responden menyatakan kurang baik.

Fungsi kepemimpinan kepala desa terhadap birokrasi desa rata-rata 63 responden meyatakan baik, 21 responden meyarakan cukup baik, sedangkan 37 responden meyatakan kepemimpinan kepala desa terhadap birokrasi kurang baik.

Fungsi kepemimpinan kepala desa dalam mengawasi pelayanan yang dilakukan pegawai rata-rata 68 responden menyatakan baik, 33 responden menyatakan cukup baik, dan 20 responden menyatakan fungsi kepemimpinan kepala desa terhadap pengawasan pelayanan yang dilakukan oleh pegawai kurang baik.

Fungsi kepemimpinan kepala desa dalam pengambilan keputusan rata-rata 58 responden menyatakan baik, kemudian 25 responden menyatakan cukup baik, dan 38 responden menyatakan fungsi kepemimpinan kepala desa terhadap pengambilan keputusan masih kurang baik.

Fungsi kepala desa dalam melaksanakan transparansi keuangan rata-rata 43 responden menyatakan baik, kemudian 33 responden menyatakan transparansi keuangan cukup baik sedangkan 45 responden menyatakan kepala desa dalam melaksanakan transparansi keuangan masih kurang baik.

Fungsi kepala desa terhadap pelayanan kepada masyarakat rata-rata 56 responden menyatakan baik, kemudian 38 responden menyatakan fungsi kepemimpinan kepala desa terhadap pelayanan kepada masyarakat cukup baik, sedangkan 27 responden menyatakan kepemimpinan kepala desa terhadap pelayanan kepada masyarakat kurang baik.

Kepemimpinan kepala desa terhadap pelaksanaan kebijakan rata-rata 40 responden menyatakan baik, kemudian 59 responden menyatakan kepemimpinan kepala desa terhadap pelaksanaan kebijakan cukup baik, sedangkan 22 responden menyatakan kepemimpinan kepala desa terhadap pelaksanaan kebijakan kurang baik.

Dalam menjalankan dan mengurus rumah tangganya kepala desa mempunyai target yang akan dicapai. Namun demikian berdasarkan program dan target yang akan dituju, kepala desa masih belum dapat mencapai target tersebut hal ini dapat dilihat pada tabel berikut yang mendukung hasil penelitian terhadap indikator mengurus kegiatan rumah tangganya.

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa tingkat fungsi kepemimpinan kepala desa dalam mengurus kegiatan pemerintahan dalam rumah tangganya berada pada posisi cukup baik, hal ini terlihat bahwa 45% responden menyatakan fungsi kepemimpinan kepala desa dalam mengurus kegiatan rumah tangganya menjawab cukup baik, namun demikian masih perlu ditingkatkan untuk mempercepat pembangunan desa.

**Tabel 5.35**  
**Tabel pendukung indikator mengurus kegiatan rumah tangganya**

No	Jenis Kegiatan	Realisasi
1	Menyelesaikan tapal batas antar desa	100%
2	Memberikan pelayanan publik kepada masyarakat	75%
3	Meningkatkan pendapatan asli desa	50%

*Sumber: Kantor Kepala Desa Mahato Sakti 2011*

Berdasarkan tabel diatas maka penulis dapat menyimpulkan bahwa fungsi kepemimpinan kepala desa dalam melaksanakan pembangunan desa di desa mahato sakti kecamatan tambusai utara tergolong baik. Namun demikian diharapkan agar kepala desa mampu meningkatkan kinerjanya dalam mempercepat pembangunan desa. Dari tabel diatas terdapat beberapa kelemahan kepala desa dalam melaksanakan pembangunan.

Kepala desa mempunyai fungsi untuk mengatur rumah tangganya berarti harus mampu mengatur seluruh kebutuhan yang diperlukan dalam proses pelaksanaan pemerintahan termasuk keuangan. Dalam penacarian keuangan pemerintah desa tidak hanya berarap bantuan dari pemerintah daerah saja, namun pemerintah desa diharapkan mampu menggali sumber-sumber keuangan yang terdapat di desa tersebut. Dengan demikian maka keuangan yang ada di desa tersebut tergolong lancar dan masyarakat tidak terbebani dalam pengurusan surat-menyerat.

Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya penulis menemukan banyak kelemahan-kelemahan yang dilakukan oleh kepala desa sebagai aparat pemerintah. Oleh karena itu, diharapkan pada masa yang akan datang kelemahan-kelemahan tersebut agar dapat diatasi secepatnya demi mempercepat pembangunan itu sendiri.

Menurut sepengetahuan penulis, kepala desa dalam melaksanakan pengurusan kegiatan dalam rumah tangganya atau tugas pemerintahan didesanya masih perlu ditingkatkan dan agar mampu mencari solusi terhadap permasalahan yang dihadapi agar masyarakat semakin nyaman dan percaya terhadap kepemimpinan kepala desa. Dalam kegiatan mengurus rumah tangganya atau pemerintahan didesanya, kepala desa harus mampu melihat kemampuan dan potensi yang dimiliki oleh desa. Disamping itu, kepala desa diharapkan dapat menyelesaikan persoalan-persoalan yang menjadi kebutuhan prioritas bagi masyarakat. Agar masyarakat dalam menerima pelayanan dan merasakan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah desa merasa puas dan senang.

Berdasarkan sepengetahuan penulis setelah penelitian dilakukan, maka penulis dapat menyimpulkan beberapa hal yang menjadi prioritas yang harus dilakukan oleh kepala desa yaitu:

- a. Meningkatkan mutu pelayanan
- b. Menggali potensi keuangan yang dimiliki desa

Kepala desa dalam memberikan pelayanan kepala desa harus mampu memberikan yang terbaik, hal ini karena pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah desa adalah suatu kebutuhan masyarakat yang harus dipenuhi. Kepala desa sebagai penggerak pelayanan publik di desa nya harus mampu memberikan transparansi kepada masyarakat setiap pelaksanaan kegiatan pelayanan publik yang dibutuhkan oleh masyarakat. Transparansi tersebut dapat berupa biaya, waktu syarat-syarat yang dibutuhkan. Agar masyarakat yang akan melaksanakan pengurusan dapat mampu memenuhi dan tidak merasa kebingungan.

Kepala desa dalam melaksanakan tugas pengurusan kegiatan dalam rumah tangganya tentu membutuhkan biaya yang tidak sedikit, oleh karena itu kepala desa harus mampu menggali potensi keuangan yang dimiliki oleh desa. Hal ini akan dapat meningkatkan keuangan di desa tersebut. Kepala desa diharapkan tidak menjadi orang yang menunggu bantuan dari pemerintah daerah dalam memenuhi finansialnya, karena akan berimbas terhadap pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena itu kepala desa harus mencari solusi keuangan selain bantuan dari pemerintah daerah agar pelayanan tetap berjalan sesuai yang diinginkan oleh masyarakat.

## 2. Melaksanakan tugas dari pemerintahan diatasnya

Adapun yang menjadi indikator pada variabel ini terlihat pada tabel 5.36 berikut:

**Tabel V.36.**  
**indikator melaksanakan tugas dari pemerintahan diatasnya**

No	Indikator Variabel	B	CB	KB	Persentase
1	Upaya kepala desa dalam meningkatkan pelayanan	48 (40%)	38 (31%)	35 (28%)	121 (100%)
2	kepemimpinan kepala desa dalam pelaksanaan pemberian jamkesmas	39 (32%)	57 (47%)	25 (21%)	121 (100%)
3	Fungsi kepala desa dalam merealisasikan program K2I	51 (42%)	49 (41%)	21 (17%)	121 (100%)
4	Fungsi kepala desa terhadap pungutan pajak bumi dan bangunan	38 (31%)	56 (46%)	27 (22%)	121 (100%)
5	Fungsi kepala desa dalam melaksanakan program konfersi minyak tanah ke gas	39 (32%)	49 (41%)	33 (27%)	121 (100%)
6	Fungsi kepala desa dalam melaksanakan tugas pembangunan dari pemerintah daerah	37 (31%)	57 (49%)	25 (21%)	121 (100%)
Jumlah		252	306	169	727
Persentase		33%	44%	23%	100%

*Sumber: Data Olahan Tahun 2011*

Pada tabel diatas dapat dijelaskan indikator variabel fungsi kepala desa dalam menjalankan program pemerintah daerah rata-rata 36 responden menyatakan baik, kemudian 58 responden menyatakan fungsi kepala desa dalam menjalankan program pemerintah daerah cukup baik, sedangkan 27 responden menyatakan fungsi kepala desa dalam menjalankan program pemerintah daerah kurang baik.

Upaya kepala desa dalam pembangunan infrastruktur rata-rata 48 responden menyatakan baik, kemudian 38 responden menyatakan upaya kepala desa dalam pembangunan infrastruktur cukup baik, sedangkan 35 responden menyatakan upaya kepala desa terhadap pembangunan infrastruktur kurang baik.

Fungsi kepala desa dalam menagawasi kegiatan pembagunan rata-rata 39 responden menyatakan baik, kemudian 49 responden menyatakan fungsi kepala desa dalam mengawasi kegiatan pembangunan cukup baik, sedangkan 25 responden menyatakan fungsi kepala desa dalam mengawasi kegiatan pembangunan kurang baik.

Fungsi kepala desa dalam melkasnakan musyawarah pembangunan desa rata-rata 51 responden menyatakan baik, kemudian 49 responden menyatakan fungsi kepala desa dalam melaksanakan musyawarah pembangunan desa cukup baik, sedangkan 21 responden menyatakan fungsi kepala desa dalam melaksanakan musyawarah pembangunan desa kurang baik.

Fungsi kepala desa dalam melaksanakan pemungutan pajak bumi dan bangunan kepada masyarakat rata-rata 38 responden menyatakan baik, kemudian 49 responden menyatakan cukup baik, sedangkan 27 responden menyatakan kurang baik.

Fungsi kepala desa dalam melaksanakan program konfersi minyak tanah ke gas rata-rata 39 responden menyatakan baik, kemudian 49 responden menyatakan kurang baik, sedangkan 33 responden menyatakan kurang baik.

Fungsi kepala desa dalam melaksnakan program K3 rata-rata 37 responden menyatakan baik, kemudian 57 responden menyatakan fungsi kepala

desa dalam melaksanakan program K3 cukup baik, sedangkan 25 responden menyatakan fungsi kepala desa dalam melaksanakan program K3 kurang baik.

Berdasarkan tabel dari rekapitulasi jawaban responden terlihat bahwa fungsi kepemimpinan kepala desa dalam melaksanakan tugas pemerintahan di atasnya berada pada posisi cukup baik, hal ini berdasarkan jawaban responden yang memberikan jawaban keseluruhannya 44% menjawab cukup baik.

**Tabel 5.37**  
**Tabel pendukung indikator melaksanakan tugas dari pemerintah di atasnya**

No	Jenis Kegiatan	Realisasi
1	Melaksanakan program K2I	45%
2	Melaksanakan Pembagian Raskin	63%
3	Melaksanakan Proram konfersi minyak tanah ke gas	90%

*Sumber: Kantor Kepala Desa Mahato Sakti 2011*

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat dan diketahui bahwa kepala desa dalam merealisasikan program dan tugas dari pemerintah di atasnya masih perlu ditingkatkan. Agar masyarakat dalam menerima hasil tersebut merasa puas terhadap kinerja kepala desa dalam melaksanakan tugasnya. Kepala desa dalam menjalankan tugas pemerintah di atasnya masih terdapat beberapa kelemahan terhadap program itu sendiri. Dalam melaksanakan tugas pemerintahan diatasnya kepala desa amsih sering mementingkan bebrapa kelompok sehingga masyarakat tdak dapat menikmati hasil secara keseluruhan.

Program K2I yang telah diprogramkan kepala daerah saat ini tehenti dikarenakan tidak adanya kontrol dari kepala desa terhadap penerima program itu. Sehingga denga demikian seolah program tersebut hanya untuk orang-orang yang terdekat kepada kepla desa. Sebagai kepala desa mempunyai tugas untuk



mengatur dan mengawasi penerima program tersebut agar masyarakat yang kurang mampu dapat merasakan program tersebut dan membantu mempercepat pengentasan kemiskinan.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan penulis maka dapat disimpulkan bahwa pemerintah desa dalam melaksanakan tugas pemerintahan di atasnya masih perlu ditingkatkan dengan sekuat upaya. Dalam menjalankan tugas pemerintahan di atasnya, kepala desa harus mampu melibatkan masyarakat luas apabila tugas tersebut bersentuhan langsung kepada masyarakat. Kepala desa harus mampu menagajak masyarakat untuk mensukseskan program yang akan dijalankan. Dengan demikian kepala desa dalam menjalankan tugas tidak teralu berat untuk menyelesaikanya.

Menurut hemat penulis kepala desa selama ini cenderung mengabaikan masyarakat dalam melaksanakan tugas pemerintahan di atasnya, padahal masyarakat sangat dibutuhkan dalam mensukseskan tugas tersebut. Seperti program yang terlihat pada tabel diatas bahwa ada program yang terhenti bahkan tidak dapat dilaksanakan 100% oleh kepala desa. Hal ini karena kepala desa masih kurang memahami betapa pentingnya masyarakat dalam mensukseskan program-program pemerintah daerah.

Oleh karena itu, untuk kedepanya penulis mengharapkan agar kepala desa mampu memperhatikan berbagai aspek dalam pelaksanaan program ataupun tugas dari pemerintahan di atasnya. Sehingga dengan demikian kepala desa akan mampu melaksanakan tugas tersebut dengan mudah.

### 3. Menggerakkan partisipasi masyarakat

Adapun yang menjadi indikator padavariabel ini terlihat pada tabel 5.38 berikut:

**Tabel V.38.**  
**Indikator menggerakkan partisipasi masyarakat**

No	Indikator Variabel	B	CB	KB	Persentase
1	Keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan desa	51 (42%)	42 (35%)	28 (23%)	121 (100%)
2	Kepedulian masyarakat terhadap pembangunan pendidikan	40 (33%)	57 (47%)	24 (20%)	121 (100%)
3	Partisipasi masyarakat dalam kegiatan sosial	61 (50%)	42 (35%)	18 (15%)	121 (100%)
4	Partisipasi masyarakat dalam bentuk ide dan pemikiran	48 (40%)	52 (43%)	21 (17%)	121 (100%)
5	Partisipasi masyarakat terhadap pembangunan dalam bentuk materi	48 (40%)	59 (49%)	14 (12%)	121 (100%)
6	Partisipasi masyarakat dalam pembangunan spiritual	29 (24%)	65 (54%)	27 (22%)	121 (100%)
7	Partisipasi masyarakat dalam gotong-royong dalam pembangunan desa	67 (55%)	33 (27%)	21 (17%)	121 (100%)
8	Peranan masyarakat dalam pembangunan desa	38 (31%)	58 (48%)	25 (21%)	121 (100%)
9	Partisipasi masyarakat dalam menjaga budaya masyarakat	41 (34%)	52 (43%)	28 (23%)	121 (100%)
Jumlah		423	460	206	845
Persentase		39%	42%	19%	100%

Sumber: Data Olahan Tahun 2011

Bersarakan tabel diatas dapat diketahui partisipasi masyarakat dalam pembnagunan fisik rata-rata 52 responden meyakini baik, 42 responden menyatakan keterlibatan masyarakat dalam pembangunan fisik cukup baik, 28

responden menyatakan keterlibatan masyarakat dalam pembangunan fisik kurang baik.

Partisipasi masyarakat dan kepedulian masyarakat terhadap pembangunan mental rata-rata 40 responden menyatakan baik, 57 responden menyatakan kepedulian masyarakat terhadap pembangunan mental cukup baik, 24 responden menyatakan kepedulian masyarakat terhadap pembangunan mental kurang baik.

Partisipasi masyarakat dalam kegiatan sosial rata-rata 61 responden menyatakan baik, 42 responden menyatakan partisipasi masyarakat dalam kegiatan sosial cukup baik, 18 responden menyatakan partisipasi masyarakat dalam kegiatan sosial kurang baik.

Partisipasi masyarakat dalam bentuk ide dan pemikiran rata-rata 48 responden menyatakan baik, 52 responden menyatakan partisipasi masyarakat dalam bentuk ide dan pemikiran cukup baik, 21 responden menyatakan partisipasi masyarakat dalam bentuk ide dan pemikiran kurang baik.

Partisipasi masyarakat dalam bentuk materiil rata-rata 48 responden menyatakan baik, 59 responden menyatakan partisipasi masyarakat dalam bentuk materiil cukup baik, 14 responden menyatakan partisipasi masyarakat dalam bentuk materiil kurang baik.

Partisipasi masyarakat dalam bentuk spiritual rata-rata 29 responden menyatakan baik, 65 responden menyatakan partisipasi masyarakat dalam bentuk spiritual cukup baik, 27 responden menyatakan partisipasi masyarakat dalam bentuk spiritual kurang baik.

Partisipasi masyarakat dalam bergotong royong rata-rata 67 responden menyatakan baik, 33 responden menyatakan partisipasi masyarakat dalam bergotong-royong cukup baik, 21 responden menyatakan partisipasi masyarakat dalam bergotong-royong kurang baik.

Peranan masyarakat dalam pembangunan desa rata-rata 38 responden menyatakan baik, 58 responden menyatakan peranan masyarakat dalam pembangunan desa cukup baik, 25 responden menyatakan peranan masyarakat dalam pembangunan desa kurang baik

Partisipasi masyarakat dalam menjaga budaya masyarakat rata-rata 41 responden menyatakan baik, 52 responden menyatakan partisipasi masyarakat dalam menjaga budaya masyarakat cukup baik, 25 responden menyatakan partisipasi masyarakat dalam menjaga budaya masyarakat kurang baik.

Berdasarkan rekapitulasi jawaban responden dapat diketahui bahwa fungsi kepemimpinan kepala desa dalam menggerakkan partisipasi masyarakat tergolong cukup baik, hal ini berdasarkan jawaban responden secara keseluruhan terhadap indikator tersebut berjumlah 43%. Dari hasil tersebut diharapkan kepada kepala desa agar mampu meningkatkan kinerjanya dalam menggerakkan partisipasi masyarakat guna menunjang laju pembangunan yang akan dilakukan.

**Tabel 5.39**  
**Tabel pendukung indikator menggerakkan partisipasi masyarakat**

No	Jenis Kegiatan	Realisasi
1	Melaksanakan gotong-royong pembangunan masjid	50%
2	Melaksanakan ronda malam	65%
3	Mengadakan perwiritan rutin bagi kaum bapak	55%

*Sumber: Kantor Kepala Desa Mahato Sakti 2011*

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa kepala desa dalam menggerakkan partisipasi masyarakat masih kurang tercapai. Hal ini berdasarkan tabel bahwa seluruh program yang direncanakan untuk menggerakkan partisipasi masyarakat tidak dapat dilaksanakan seluruhnya ataupun tidak dapat diterima oleh masyarakat seluruhnya.

Kepala desa mempunyai tugas dalam meenggerakkan partisipasi masyarakat denga tujuan agar dapat mempercepat pembangunan disegala bidang. Apabila masyarakat dapat berpartisipasi dalam pelaksanaan pemabngunan maka seluruh program yang telah direncanakan akan mudah diselesaikan dan setiap program yang terhambat akan mudah dicarikan solusi demi percepatan pembangunan itu sendiri.

Dalam menggerakkan partisipasi masyarakat kepala desa harus mampu memahami keadaan masyarakat luasnya. Hal ini karena berpengaruh terhadap program yang akan dijalankan nantinya. Kepala desa diharapkan mampu merangkul seluruh elemen masyarakat dalam merencanakan dan membuat proogram yang akan dilaksanakan. Hal ini dikarenakan apabila kepala desa dalam membuat perenanan yang bersifat partisipasi masyarakat tidak melibatkan masyarakat itu sendiri akan sering mendapat penolakan dari maysyarakat tersebut.

Oleh karena itu sebelum membuat kebijakan tentang parisipasi masyarakat kepala desa harus mampu mengajak dan merangkul masyarakat tersebut dalam membuat program yang akan dilaksanakan. Sehingga dengan

demikian program yang direncanakan kepala desa bersama masyarakat akan dapat dilaksanakan oleh masyarakat luas.

#### 4. Menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat

Adapun yang menjadi indikator pada variabel ini terlihat pada tabel 5.39 berikut:

**Tabel V.40.**  
**Indikator menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat**

No	Indikator Variabel	B	CB	KB	Persentase
1	Keberhasilan kepala desa dalam menggalakkan ronda malam	58 (48%)	37 (31%)	26 (21%)	121 (100%)
2	Fungsi kepala desa dalam memelihara kerukunan antar umat beragama	52 (43%)	42 (35%)	27 (22%)	121 (100%)
3	Fungsi kepala desa dalam menyatukan pendapat antar suku	37 (31%)	39 (32%)	45 (37%)	121 (100%)
4	Fungsi kepala desa dalam memberantas pekat di desa	47 (39%)	52 (43%)	22 (18%)	121 (100%)
5	Fungs kepala desa dalam menjaga keharmonisan masyarakat	49 (41%)	55 (45%)	17 (14%)	121 (100%)
6	Fungsi kepala desa dalam meemilihara persatuan dan kesatuan masyarakat	53 (44%)	37 (31%)	31 (25%)	121 (100%)
7	Fungsi kepala desa dalam menjaga adat istiadat masyarakat	42 (35%)	57 (47%)	22 (18%)	121 (100%)
Jumlah		338	319	190	845
Persentase		39%	37%	22%	100%

Sumber: Data Olahan Tahun 2011

Berdasarkan tabel diatas terlihat dengan jelas indikator-indikator variabel ini sangat barpariatif, dimana keberhasilan kepala desa dalam menggalakkan ronda malam rata-rata 58 responden memberikan jawaban baik, kemudian 37

responden meberikan jawaban cukup baik sedangkan 27 responden memberikan jawaban kurang baik.

Fungsi kepal desa dalam memelihara kerukunan antar umat bergama rata-rata 52 responden memberikan jawaban baik, kemudian 42 responden memberikan jawaban terhadap fungsi kepala desa dalam memelihara kerukunan antar umat beragama cukup baik, sedangkan 27 responden memberikan jawaban kurang baik.

Fungsi kepala desa dalam menyatukan pendapat antar suku rata-rata 37 responden memberikan jawaban baik, kemudian 39 responden memberikan jawaban cukup baik, sedangkan 45 responden memberikan jawaban kurang baik terhadap fungsi kepala desa dalam menyatukan pendapat antar suku.

Fungsi kepala desa dalam memberantas penyakit masyarakat rata-rata 47 responden menyatakan baik, kemudian 52 responden memberikan jawaban cukup baik, sedangkan 22 responden memberikan jawaban kurang baik terhadap fungsi kepala desa dalam memebrantas pekat di desa.

Fungsi kepal desa dalam menjaga keharmonisan masyarakat rata-rata 49 responden meyatakan baik, kemudian 55 responden menyatakan fungsi kepala desa dalam memelihara keharmonisan masyarakat cukup baik, sedangkan 17 responden meyatakan fungsi kepala desa dalam memelihara keharmonisan masyarakat kurang baik.

Fungsi kepala desa dalam memelihara persatuan dan kesatuan masyarakat rata-rata 52 responden menyatakan baik, kemudian 37 responden myatakan fungsi kepala desa dalam memelihara persatuan dan kesatuan masyarakat cukup

baik, sedangkan 31 responden menyatakan fungsi kepala desa dalam memelihara persatuan dan kesatuan masyarakat kurang baik.

Fungsi kepala desa dalam memelihara adat istiadat masyarakat rata-rata 42 responden menyatakan baik, kemudian 57 responden menyatakan kurang baik, sedangkan 22 responden menyatakan fungsi kepala desa dalam memelihara adat istiadat kurang baik.

Berdasarkan hasil survey dan rekapitulasi jawaban responden terhadap indikator fungsi kepala desa dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat tergolong cukup baik, hal ini dibuktikan dengan 37% responden menyatakan bahwa fungsi kepemimpinan kepala desa dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat cukup baik. Diharapkan kepada kepala desa agar mampu meningkatkan motivasi dan kinerjanya dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat demi menjaga ketentraman antar penduduk.

**Tabel V.41**  
**Tabel pendukung indikator memelihara keamanan**  
**dan ketertiban masyarakat**

No	Jenis Kegiatan	Realisasi
1	Melakukan swiping tempat perjudian	100%
2	Menutup kedai-kedai minuman keras	90%
3	Melakukan pendataan pendatang baru	60%

*Sumber: Kantor Kepala Desa Mahato Sakti 2011*

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa fungsi kepala desa dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat tergolong baik. Namun demikian diharapkan agar kepala desa mampu mempertahankannya bahkan meningkatkannya. Hal ini demi kenyamanan masyarakat setempat dalam



melaksanakan aktifitas. Disamping itu diharapkan agar kepala desa mampu mengatasi berbagai permasalahan yang berkaitan dengan keamanan dan kenyamanan masyarakat agar masyarakat merasakan kedamaian dalam kehidupan bermasyarakat tersebut.

Menurut hemat penulis peranan kepala desa dalam melaksanakan tugas menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat sangat penting sekali. Oleh karena itu kepala desa dalam menjalankan tugas tersebut dapat bekerjasama dan melibatkan masyarakat luas agar keamanan dan ketertiban tersebut dapat terlaksana dengan baik. Keamanan dan kenyamanan adalah hal yang paling penting dalam kehidupan bermasyarakat, maka keamanan dan ketertiban harus menjadi program yang serius bagi pemerintah desa.

Daerah dapat dikatakan maju dan masyarakatnya cerdas adalah daerah yang mampu menjaga keamanan dan ketertiban bermasyarakat. Semakin tinggi tingkat keamanan dan ketertiban masyarakatnya maka semakin tinggi nilai dan kualitas masyarakat tersebut.

Berdasarkan hasil survey secara keseluruhan terhadap seluruh indikator dapat disimpulkan bahwa jenis jenis kegiatan pembangunan yang telah dilaksanakan oleh kepala desa dalam menjalankan tugasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel V.42.**  
**Tabel Jenis Kegiatan Pembangunan fisik**  
**yang Telah Dilaksanakan Kepala Desa**

No	Jenis Pembangunan	Realisasi
1	Pembangunan Masjid Al-Mukarom	70%
2	Pembangunan gorong-gorong	75%
3	Pembangunan aula pertemuan desa	50%

Sumber: *Kantor Kepala Desa Mahato Sakti 2011*

**Tabel V.43.**  
**Tabel Jenis Kegiatan Pembangunan Non fisik**  
**yang Telah Dilaksanakan Kepala Desa**

No	Jenis Pembangunan	Realisasi
1	Pelatihan kepemimpinan pemuda	30%
2	Pelatihan keterampilan pemuda-pemudi	55%
3	Pelatihan koperasi bagi masyarakat	40%

Sumber: *Kantor Kepala Desa Mahato Sakti 2011*

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui jenis pembangunan yang telah dilaksanakan oleh kepala desa dalam menjalankan tugasnya sebagai kepala pemerintahan didesanya. Berdasarkan kenyataan dilapangan kepala desa dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan pembangunan sering melakukan kesalahan mulai dari perencanaan pelaksanaan yang berakibat kepada hasil yang tidak memuaskan. Oleh sebab itu, masyarakat berharap kepada kepala desa agar berusaha meningkatkan kinerjanya dimasa yang akan datang demi kemajuan masyarakat dalam merasakan pembangunan.

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang diadakan pada Desa Mahato Sakti Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Fungsi kepemimpinan kepala desa dalam mengurus kegiatan rumah tangganya masih kurang baik, hal ini berdasarka latar belaksnga masalah yang ada. Dengan demikian kepala desa harus memperbaiki dan meningkatkan kinerja demi mempercepat pembangunan desa tersebut.
2. Fungsi kepemimpinan kepala desa dalam melaksanakan tugas pemerintahan diatsnya juga masih tergolong kurang baik, karena setiap program dan bantuan dana yang diberikan kepada kepala desa tidak disalurkan secepatnya guna mensukseskan pemabngunan.
3. Fungsi kepemimpinan kepala desa dalam menggerakkan partisipasi masyarakat tergolong baik, hal ini ditujnjukkan beberapa kegiatana yang bersifat kemasyarakat mendapatkan dukungan dari masyarakat luas.
4. Fungsi kepala desa dalam menjag keamanan dan ketertiban masyarakat tergolong baik, namun pelu ditingkatkan agar kemanan dan ketertiban masyarakat tetap terjaga dan dapat dipertahankan.

## **B. Saran**

Adapun saran yang perlu penulis kemukakan sesuai dengan hasil penelitian kepemimpinan kepala desa terhadap pembangunan desa mahato sakti keamatan tambusai utara kabupaten rokan hulu.

1. Kepala Desa Mahato Sakti Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu harus tegas dalam membuat kebijakan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi, sehingga masyarakat lebih tegas dalam menyikapi kebijakan yang telah dibuat oleh kepala desa.
2. Kepala harus dapat merangkul semua komponen masyarakat didesanya, sehingga mereka dilibatkan dalam pembangunan desa dalam mengadakan keluasan hubungan sosial dan menerapkan sikap-sikap kemanusiaan yang baik.
3. Perlunya kepala desa melakukan koordinasi yang lebih baik terhadap Apartur Desa agar lebih membantunya dalam memecahkan persoalan pembangunan desa sehingga dapat memberikan masukan bagi kepala desa terhadap kekurangannya mendapat inisiatif atau ide emerlang, sehingga tidak menonnton ide atau inisiatif dari kepala desa tersebut.
4. Kepala desa perlu lebih menggali potensi yang ada dimasyarakatnya guna memperepat perkembangan pembangunan desa disegala bidang.

## DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, Leo, 2006. *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung, Alfabeta
- Hasibuan, Malayu, 2001. *Manajemen*. Jakarta, Bumi Aksara
- Kartini, Kartono, 2004. *Pemimpin dan Kepemimpinan*. Jakarta, PT Raja Grafindo Persada
- Manulang, 2006. *Dasar Manajemen*. Yogyakarta, UGM Press
- Moekijat, 2005. *Pengembangan Organisasi*. Bandung, Mandar Maju
- Nawawi, Hadari dan Martini. 2006. *Kepemimpinan yang efektif*. Jogjakarta UGM Press
- Nawawi, Hadari, 2006. *Kepemimpinan Mengefektifkan Organisasi*. Yogyakarta, UGM Press
- Ndaraha, Tanziliduhu, (1985). *Desa dan Kepemimpinan Kepala Desa Dalam pembangunan*. Bandung alfabeta
- Nurhayati (2007) *Skripsi fungsi kepala desa dalam menggerakkan birokrasi*. UIR
- Riberru, J, 2003. *Dasar Kepemimpinan*. Jakarta, Pedoman Ilmu Jaya
- Rivai, Veitzal, 2003. *Kepemimpinan*. Jakarta, Bumi Aksara
- Sugiono, 2003. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung, Alfabeta
- Siagian P. Sondang, 2004. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Bumi Aksara, Jakarta
- Siagian P. Sondang, 1999. *Organisasi Kepemimpinan dan Prilaku*. Jakarta, CV. Hajimas Agung
- Siagian, P Sondang, 2004. *Filsafat Administrasi Negara*. Bandung, Bumi Aksara
- Soeharto, Irawan, 2004. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung, PT. Remaja Rosdakarya
- Thoha, Mitah. 2007. *Kepemimpinan dalam Manajemen*. Jakarta. PT. Raja Grafindo persada
- Wibowo, 2001. *Manajemen Perubahan*. Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada

Winardi, 2003. *Teori Organisasi dan Pengorganisasian*. Jakarta, PT. Raja Grafindo

#### DOKUMENTASI

KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR: 53 TAHUN 1999, TENTANG PENETAPAN KABUPATEN ROKAN  
HULU SEBAGAI KABUPATEN DEFINITIF

UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004 TENTANG  
PEMERINTAHAN DAERAH

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 72 TAHUN  
2005 TENTANG DESA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU NOMOR: 32 TAHUN  
2002. TENTANG PEMERINTAHAN DESA.